

IV. Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

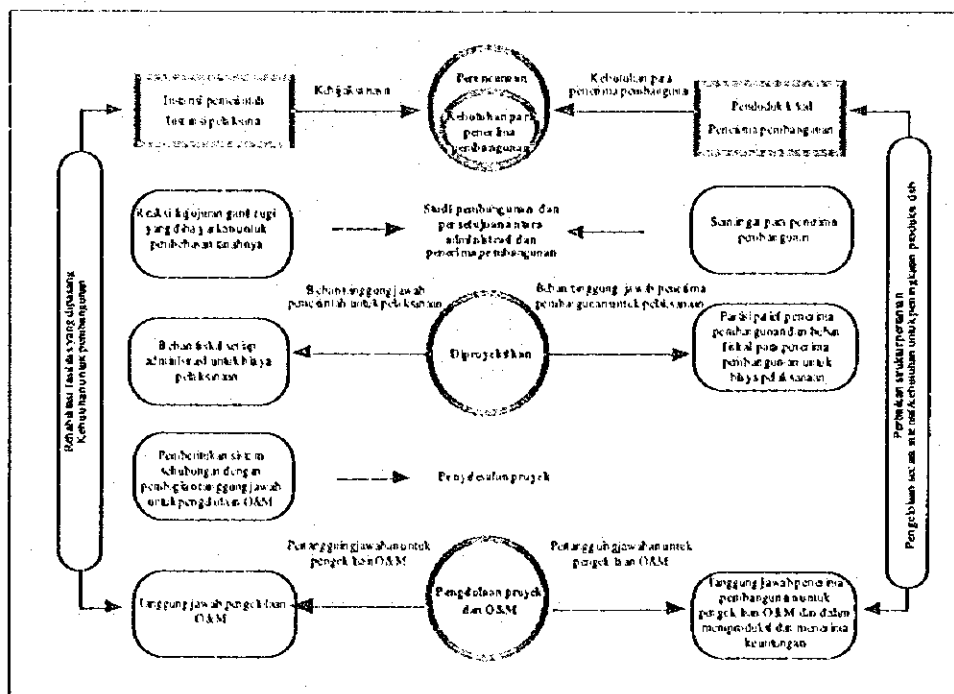
IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

1. Metoda-metoda Partisipasi dan Arti pentingnya

1.1. Pembangunan partisipatif (Pengikutsertaan)

Pembangunan Partisipatif (PD) adalah metoda penting untuk mengembang-pesatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada lapisan masyarakat miskin dan lemah. Konsep kunci pembangunan partisipatif adalah, bahwa alokasi investasi pembangunan tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat itulah yang menentukan prioritas kebutuhan pembangunan dan melakukan pelaksanaan dan pemeliharaan asset yang dihasilkan.

Khususnya sektor pertanian dan pedesaan mempunyai banyak keluarga miskin, jadi peran serta penuh mereka itu dalam proyek pembangunan adalah suatu hal yang penting. Penduduk yang berperan serta itu juga perlu diorganisasi agar kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan mereka itu berkembang melalui proses proyek tersebut.



Gambar 4 - 1 Adalah diagram skematik pembangunan partisipatif.

Sebagaimana diperlihatkan dengan jelas dalam skema tersebut, jika konsep pembangunan, yang biasanya di negara berkembang dilakukan dengan pendekatan kebijaksanaan ("dari atas ke bawah/Top Down"), dapat dibuat agar mencerminkan kepentingan dari mereka yang akan memperoleh hasil pembangunan tersebut dan penduduk setempat lainnya, maka pembangunan itu sendiri akan sangat mungkin mereka terima/ setuju. Rencana yang rasional juga bisa dikembangkan untuk mengurangi dampak sosial dari pemindahan penduduk dan jumlah ganti rugi yang harus dibayar untuk pembebasan tanah. Perjanjian dari pihak penerima pembangunan

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

(*benefisier*) akan jelas menentukan bahwa “beban tanggung jawab atas proyek ada pada *benefisier*” pada tahap berikutnya. Dengan cara ini akan lebih mudah menentukan “sistem pertanggung jawaban”, yang biasanya justru merupakan hal paling sukar di negara berkembang. Dengan cara ini beban pajak juga bisa dikurangi dalam administrasi yang dibebankan oleh Bank Dunia/IMF. Pendekatan ini sangat berguna sebagai cara untuk menyederhanakan pengaturan sistem manajemen fasilitas dan pembagian tanggung jawab atas sistem tersebut.

1.2. Pembangunan organisasi dan sistem

Organisasi masyarakat dan pembangunan sistemnya, merupakan titik-titik penting dalam pembangunan partisipatif. Khususnya dalam proyek yang ditargetkan kepada masyarakat yang baru terbentuk atau belum matang, upaya untuk menguatkan organisasi dan pembangunan sistem, adalah hal yang tak dapat dielakkan. Upaya tersebut membangun struktur dan kerangka fungsi yang membantu proyek untuk mencapai tujuannya secara efisien dan membangun secara berkesinambungan. Pembangunan organisasi dan sistem merupakan unsur vital untuk menghasilkan efek proyek (kesempatan untuk berhasilnya pelaksanaan proyek, adil dan mendapat dukungan dari penduduk serta berkesinambungan) dan membentuk serta mengupayakan adanya kemampuan yang diperlukan demi tercapainya kemajuan sosial yang berkesinambungan dan independen. Hal itu juga memungkinkan tercapainya tujuan bantuan.

1.3. Metoda-metoda pembangunan partisipatif

Dalam bab ini kami akan membahas metoda-metoda survey sehubungan dengan partisipasi publik dalam proyek pembangunan. Partisipasi ini adalah unsur penting yang harus dipertimbangkan bila hasil analisis sosial, diinginkan tercermin dalam penentuan rencana. Partisipasi publik artinya adalah bahwa masyarakat yang akan dipengaruhi oleh proyek tersebutlah yang memulai perubahan untuk diri mereka, ketimbang hanya secara pasif menerima perubahan yang dilakukan terhadap mereka, atau malah menentang perubahan. Dengan cara itu masyarakat akan mengakui apa tujuan proyek, dan mereka diberdayakan serta sanggup menyumbang terhadap proses pembuatan keputusan. Agar bisa berhasil maka ide-ide, keinginan dan perhatian dari tokoh terkemuka dalam masyarakat tersebut harus didengar dan tercermin didalam rencana. Partisipasi pada tahap pelaksanaan proyek akan membantu masyarakat untuk menyesuaikan diri secara baik dengan perubahan yang dihasilkan dan merasa turut bertanggung jawab untuk memelihara fasilitas yang dibangun. Partisipasi penuh harus mulai sejak awal dan bukan hanya melibatkan pemilihan proposal. Jadi ketimbang menerapkan “pendekatan cetak biru”, partisipasi penuh justru membutuhkan “pendekatan proses”. Partisipasi *benefisier* membagi proyek kedalam beberapa tahap dalam rencana pembangunan sehingga akan lebih mudah merevisinya selama proses pembangunan. Dalam hal ini diperlukan adanya kepemimpinan yang kuat yang sanggup mengatasi kendala dan menempa kesepakatan. Pertemuan yang diadakan bertepatan dengan dimulainya survey pembangunan proyek, adalah cara penting untuk dapat meningkatkan pembangunan partisipatif dengan mengatakan kepada penduduk apa yang menjadi proyek, dengan cara yang

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

jelas dan efektif. Penyebaran pamflet dan sebagainya untuk memperkenalkan proyek kepada semua penduduk dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mengkaji ulang isi dan konsep proyek dan juga untuk mengetahui apakah setiap orang sudah benar-benar memahami tujuan, rencana dan proses proyek. Pendekatan ini juga berguna sebagai sarana untuk memberikan kepada staf proyek dan penduduk yang akan memainkan peran penting demi berhasilnya proyek tersebut suatu rasa komitmen (sense of commitmen). Pertemuan yang dilangsungkan pada awal survey pembangunan sudah merupakan praktek yang semakin umum dilakukan di semua sektor dalam dasawarsa yang lalu.

Berikut ini adalah contoh proses pembangunan partisipatif.

- 1) Dialog antara kelompok sasaran dan badan pelaksanaan dirangsang agar kelompok sasaran dapat memberikan masukan yang bermakna terhadap pembuatan rencana.

Contoh: Memilih tehnik pertanian yang sesuai dan lokasi sub proyek, menentukan jasa pendidikan yang perlu dan perumusan serta persetujuan tentang rancangan saluran air untuk sub proyek irigasi, dsb.

- 2) Penentuan mekanisme partisipasi kelompok sasaran dalam proses perencanaan konstruksi dan operasi.

Contoh: Pembicaraan/diskusi antara pemerintah dengan masyarakat. Pelatihan staf pendidikan mengenai pendekatan apa yang ingin diambil kelompok, penguatan peranan pemimpin lokal, penciptaan forum dan revisi saluran komunikasi tradisional diantara penduduk yang berbeda bahasa dan tingkat melek hurufnya, percobaan ujian penerapan, urunan dalam pemantauan efek pembangunan dengan petani, pengorganisasian dan pembentukan kelompok sasaran baru untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok, penguatan organisasi yang ada, pelatihan dalam bidang manajemen, keuangan dan tehnik untuk kelompok lokal, dsb.

Dialog dengan masyarakat sekitar proyek adalah titik start untuk menangkap ide masyarakat tersebut guna membentuk dasar bagi pembangunan partisipatif. Dengan kata lain, "pertanyaan" orang macam apakah yang harus kita hubungi" pada tahap survey pembangunan mengarah pada "melalui kelompok sosial manakah kita harus mendorong partisipasi dalam pembangunan?".

- (1) Pendekatan pada pembangunan partisipatif sesuai dengan skala bidang rencana.

Seperti diperlihatkan dalam tabel 4 - 1, istilah pembangunan partisipatif dapat diterapkan dalam berbagai situasi, dan apa sesungguhnya yang dimaksudkan adalah tergantung pada skala dan bidang pembangunan yang akan dilakukan. Misalnya proyek untuk pembangunan suatu sistim

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

distribusi pembangunan atau survey masterplan untuk konservasi dana akan mencakup bidang yang luas. Dalam sistem distribusi misalnya, banyak kelompok sosial yang dilibatkan dan kepentingan mereka itupun berbeda-beda. Misalnya kelompok pengusaha, produsen pertanian, jasa angkutan, manajer pasar, pengguna pasar dan masyarakat umum. Berbagai ragam kelompok harus dilibatkan dan sejauh mungkin pandangan mereka itu didengar dari berbagai segi. Bila informasi kurang lengkap ketika rencana pembangunan dirancang, akan timbul resiko ketidakadilan dimana hanya kelompok tertentu saja yang akan beruntung dari pembangunan tersebut sedang yang lainnya memikul beban. Dalam kasus seperti itu akan tidak mungkin tercapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Karena itu harus diupayakan menampung pandangan dari berbagai kelompok misalnya dengan interview dengan kelompok individu atau dengan pertemuan kelompok.

Table 4-1 Penilaian Kebutuhan

Skala survey	Peserta	Metoda wawancara dengan peserta
Survey pembangunan berskala besar, yaitu Peningkatan sistem distribusi nasional	Orang yang berkepentingan di Pemerintah Pusat Instansi berwenang di daerah yang berkepentingan Berbagai instansi dibawah organisasi nasional Kamar Dagang Kelompok ekonomi Organisasi industri (perusahaan pelayaran dsb) LSM tingkat nasional	Rapat Umum Berbagai tipe wawancara Seminar PCM = Pengelolaan Daur Proyek
Survey pembangunan berskala menengah, yaitu Pembangunan Regional Terpadu	Orang yang berkepentingan di Pemerintah Pusat Instansi berwenang di daerah Kamar Dagang Daerah Kelompok industri utama di daerah LSM tingkat daerah Penduduk beberapa desa	Berbagai tipe wawancara Seminar PCM = Pengelolaan Daur Proyek Metoda penilaian cepat
Survey pembangunan berskala kecil, yaitu Pembangunan Model Desa	Orang yang berkepentingan di Pemerintah Pusat Instansi berwenang di daerah Anggota Kamar Dagang desa Pekerja di industri pokok desa Operasi LSM di desa Penduduk desa itu sendiri	Survey wawancara Metoda penilaian cepat

(2) Metoda survey untuk pembangunan partisipatif

Selain pendekatan yang disebutkan di atas, bisa juga dirancang kesempatan bagi penduduk negara berkembang untuk dilibatkan dalam pembuatan rencana pembangunan dalam kerangka master plan

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

studi kelayakan. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah diajukan beberapa metoda penilaian cepat.

Di waktu yang lalu metoda penilaian cepat ini dinamakan Rapid Rural Appraisal, artinya adalah cara mendapatkan kelompok sosial dalam bidang pembangunan lalu dikaji aktifitas ekonomi dan sosialnya untuk pekerjaan analisa sosial. Pendekatan survey ini mengandung aspek antropologis dengan cara mengumpulkan informasi yang banyak tanpa harus menggunakan waktu yang banyak. Itulah sebabnya metoda ini dinamakan “sederhana” atau “cepat “ (*rapid*). Bisa juga disebut pedesaan, namun metoda ini akan dapat diterapkan pada daerah kumuh di daerah perkotaan. Metoda penilaian cepat (*rapid appraisal*) ini sudah bergeser sekarang dari interview secara terstruktur sebagaimana digunakan di waktu lalu, menuju participatory rural appraisal (*penilaian partisipatif pedesaan*), dimana dalam analisa proses, yang banyak dilibatkan adalah penduduk. Dalam proses ini digunakan presentasi geografis seperti peta, dan sebagainya, untuk memungkinkan partisipasi penuh dari masyarakat yang tingkat melek hurufnya rendah. Bila digunakan dalam proyek pembangunan yang tidak mencakup daerah yang luas, seperti misalnya pembangunan desa kecil, metoda ini dapat mengumpulkan semua jenis informasi dengan tingkat kecepatan yang sama tingginya dengan metoda sample. Di waktu mendatang metoda ini harus dikembangkan agar mudah diterapkan untuk skala luas seperti master plan.

(3) Metoda survey untuk pembangunan partisipatif dalam pembangunan pedesaan yang hanya dibatasi dalam daerah-daerah tertentu saja.

Bila isi survey pembangunan pedesaan hanya dibatasi untuk daerah tertentu saja, partisipasi masyarakat dapat dibuat dengan mengadakan dengar pendapat. Ini mirip dengan pendekatan partisipatif yang dilakukan dalam pembangunan berskala kecil yang ditangani khususnya oleh Organisasi Non Pemerintah di waktu yang lalu. Pada mulanya, organisator sosial dikirimkan ke desa-desa untuk membuat kontak/hubungan langsung secara berulang-ulang dengan penduduk. Dengan cara ini organisator sosial akan memahami berbagai kebutuhan penduduk, kelompok sosial apasaja yang ada di dalam desa dan bagaimana hubungan antara berbagai kepentingan mereka. Dengan dasar inilah baru diputuskan apakah akan dapat diketahui apakah aktivitas pembangunan akan efektif atau tidak. Isi partisipasi tergantung pada tujuan survey pembangunan, namun tidak berarti bahwa “pembangunan partisipatif tidak tepat karena skalanya makro”. Yang perlu adalah bagaimana caranya menerapkan metoda-metoda yang diciptakan.

(4) Pembentukan konsensus mengenai pembangunan (Dialog dengan penduduk adalah awal dari pemerintah yang baik)

Gambar 4 - 2 adalah contoh konsep pola partisipasi. Pendekatan ini dimulai dari pembentukan kesepakatan antara instansi pemerintah yang dilibatkan dalam kemajuan pembangunan partisipatif tersebut dengan penduduk setempat mengenai rencana pembangunan, dan dilanjutkan

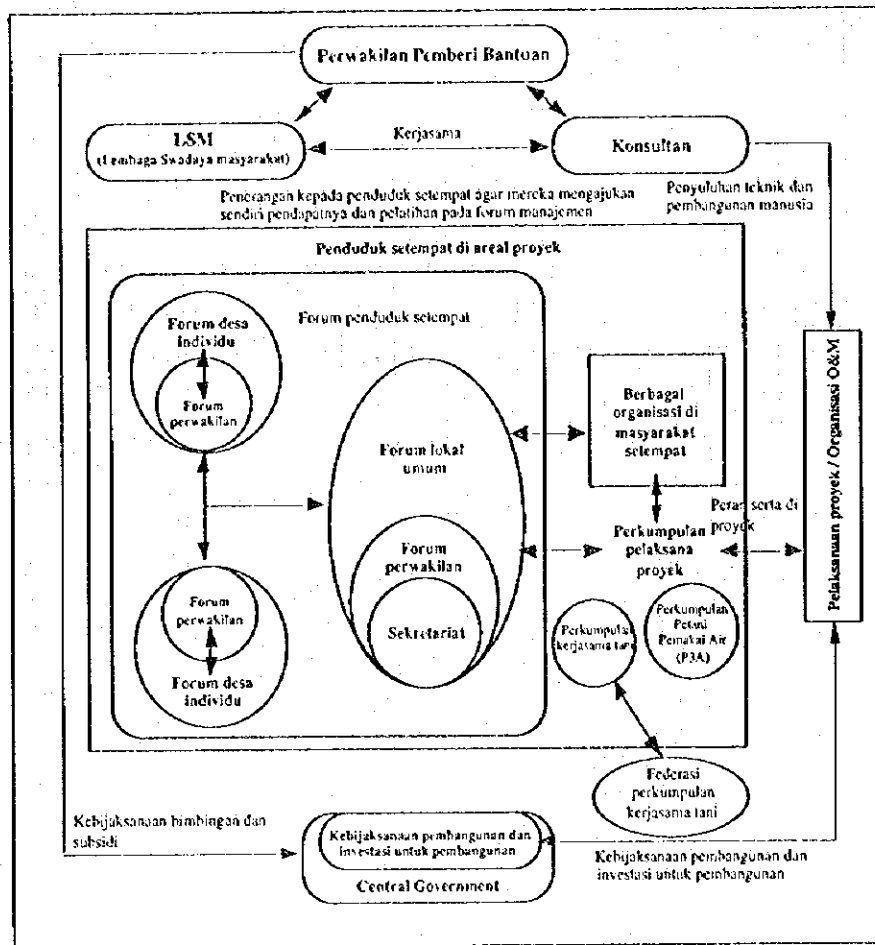
IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

sampai dengan tahap pelaksanaan proyek pembangunan dan pelibatan secara terorganisir penduduk dalam operasi dan pemeliharaan proyek pembangunan tersebut. Dalam proses ini sisi pemerintah menguraikan apa yang menjadi tujuan proyek, sedang penduduk menyampaikan idenya dalam forum pedesaan dan pada tingkat regional agar bisa menggambarkan secara lengkap apa yang menjadi kebutuhan penduduk. Kemudian unsur pemerintah dan penduduk bertukar pikiran (melalui dialog dan pertemuan-pertemuan) lalu menyesuaikan konsep rencana sesuai dengan hasil dialog. Bila konsep rencana telah disesuaikan secara memuaskan, penduduk sekitar kemudian membentuk kelompok pelaksana pembangunan dan menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban masyarakat penerima pembangunan (benefisier), di dalam anggaran dasar proyek tersebut. Namun situasi umum di negara berkembang adalah, bahwa fungsi-fungsi pemerintah masih belum matang, dan masih banyak persoalan yang masih perlu diatasi dalam pembangunan regional. Dari segi penduduk, tentu mereka itu tidak punya cukup kemampuan untuk mengisi peran yang digambarkan dalam diagram tersebut. Dalam kondisi ini, semakin banyak waktu kelompok survey (konsultan) dan lembaga swadaya dilibatkan dalam diskusi dengan penduduk, maka akan semakin tinggillah kesanggupan kelompok tersebut untuk bertindak sebagai wakil mereka. Mereka juga bisa bertindak sebagai wakil pemerintah, dalam arti mereka itulah yang menjelaskan posisinya, jadi bukan seluruhnya atas permintaan penduduk.

Posisi "tengah" ini bisa diartikan sebagai pemberian kepada Organisasi Non Pemerintah tersebut suatu peran penting untuk melancarkan saluran komunikasi dan membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dengan penduduk. Pembangunan hubungan saling percaya antara pemerintah dengan penduduk sangat penting "untuk menjamin tercapainya hasil yang berkelanjutan".

Karena itu survey pembangunan haruslah dipahami sebagai kesempatan untuk mencapai skenario pembangunan atas dasar saling sepakat. Pembangunan partisipatif tidak harus dihindari dengan alasan pemborosan waktu, tapi justru harus diartikan sebagai proses pembentukan kesepakatan.

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan



Gambar 4-2 Contoh konsep pola partisipasi

2. Partisipasi petani dalam keadaan senyatanya

2.1. Catatan partisipasi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan

Menurut GERSAMATA (*Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Terpadu*) di Sulawesi Selatan, mekanisme pendekatan yang dilakukan adalah dari bawah ke atas/bottom-up. Pendekatan ini mendapat dukungan penduduk pedesaan. Kepala desa, pejabat desa dan pekerja pendidikan yang ditugaskan di masing-masing desa memberikan advis, dukungan dan kontribusi lainnya. Di tingkat kecamatan, peranan ini dimainkan oleh pejabat kecamatan dan Pusat Pendidikan Pertanian. Dalam proyek ini, "partisipasi berskala luas dari penduduk pedesaan" pada tahap perencanaan adalah partisipasi langsung dari kelompok tani.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah organisasi desa yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dan pekerjaan lainnya. Program Kesejahteraan Keluarga (PKK/Family Welfare Organization) adalah bagian dari LKMD. Kami telah mengkaji pengalaman organisasi ini (LKMD dan PKK) dalam sebuah rencana irigasi sebagai contoh dari pengalaman mereka tentang pembangunan partisipatif dan partisipasi kelompok tani dalam tahap perencanaan proyek.

(1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Di desa Ranometo, seluruh anggaran LKMD untuk tahun 1990/91 dialokasikan pada delapan bidang pembangunan.

Anggaran ini jumlahnya Rp. 2 juta (meningkat dari Rp. 1.5 juta pada tahun sebelumnya). Ini sudah termasuk untuk PKK. Angka ini diambil dari buku pedoman Menteri Penerangan, yang dibayarkan setiap tahun sebagai subsidi propinsi kepada LKMD. Selain itu ada Rp. 500,000,- subsidi untuk PKK dari Menteri dalam Negeri.

LKMD Lanometo mengalokasikan dana konstruksi kepada masing-masing bagian dalam Lingkungan untuk masing-masing membangun sebuah jalan, satu jembatan kecil dan saluran irigasi.

Di desa Paranga, yang terdiri dari lima lingkungan, dialokasikan Rp. 2 juta untuk pembuatan 4 km jalan desa di Lingkungan 1 dan 2. Dari 4 km tersebut, satu jalan dibangun atas swadaya masyarakat desa.

Anggaran PKK Rp. 500,000 (untuk tahun 1990/91) dialokasikan untuk pelatihan (Rp. 110,000 untuk pelatihan non pertanian), posyandu Rp. 110,000, proyek penambahan pendapatan Rp. 130,000, Kebun PKK Rp. 100,000 untuk pembelian pohon buah, bibit sayuran, dan sebagainya

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

dan proyek-proyek lainnya. Tahun sebelumnya didapat Rp. 300,000 untuk pembelian 25 pacul untuk digunakan untuk Kebun PKK.

Desa Kiaea mengalokasikan Rp 1.2 juta anggaran LKMD-nya tahun sebelumnya untuk pembangunan balai desa. Sedang sejumlah Rp. 2.8 juta dari jumlah biaya Rp 4 juta telah dibayar oleh penduduk sendiri. Dana Rp 300,000 untuk PKK pada tahun yang sama telah dialokasikan untuk membeli 25 sapi bagi para anggota. Proyek lain telah diselesaikan melalui partisipasi penduduk. Proyek ini termasuk pembuatan lima pos perbatasan sekitar pinggir desa (Rp 400,000), pembuatan beberapa jembatan kecil di 12 lokasi (Rp. 720,000), 5 km jalan desa (Rp 2.5 juta) dan posyandu (Rp. 110,000).

Proyek-proyek ini menggambarkan bagaimana dengan anggaran yang terbatas ternyata bisa digunakan untuk prioritas desa, khususnya infrastruktur pedesaan, yang direncanakan untuk meningkatkan cara hidup masyarakat.

(2) Rencana dan proyek oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air

Dua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) telah dibentuk di Ranometo (Himpunan Pengguna Air Sri Mangiyub dan Makmur Jaya). Himpunan ini membangun dan mengelola saluran tanah dan ambilan air yang diperlukan untuk irigasi. Himpunan Pengguna Air Sri Mangiyub dibentuk tahun 1986 dengan total 3.5 km saluran air, untuk melayani 100-150 ha tanah, tergantung musim. Himpunan ini terdiri dari 3 kelompok berjumlah 51 petani dan dipimpin oleh sebuah komite terdiri dari 3 pimpinan. Himpunan Pengguna Air Makmur Jaya mempunyai saluran sepanjang 1 km dengan tiga cabang saluran dan mengirigasi sekitar 40 ha. Daerah ini terdiri dari 4 kelompok tani.

Desa Jati Bali terletak di luar lingkup proyek, namun telah mempunyai pengalaman dalam merencanakan, memelihara dan mengelola seluruh sistem irigasi yang mengandung banyak titik-titik instruksi. Himpunan mereka itu dinamakan "sebak" dan telah berakar di bali dan ditopang oleh keyakinan agama dan kesatuan yang kuat dari anggota masyarakatnya.

Para petani ini ditempatkan pada tahun 1968 di salah satu proyek penampungan pemerintah. Mereka ditempatkan di desa baru seluas 200 ha lahan padi sawah dimana masing-masing diberi 2 ha lahan. Saluran air diselesaikan dua tahun berikutnya. Ini menjadi dasar untuk jaringan irigasi sepanjang 8 km, terdiri dari 3 km saluran utama dan 6 saluran lainnya, yang diselesaikan sepuluh tahun kemudian. Tentu saja jaringannya dibangun dengan benteng tanah, dan pada setiap tahun musim yang tepat penduduk akan memperbaikinya dan merumputinya agar tetap bisa beroperasi.

Prinsip kunci dari pendekatan sebak ini (dalam pengelolaan air) ialah, air irigasi dialokasikan secara adil, sehingga semua lahan mendapatkan jumlah air yang sama pada waktu yang sama, dengan demikian memungkinkan petani dapat menanam pada saat yang sama. Pembagian air

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

diatur sedemikian rupa sehingga dalam musim kemarau pun tidak ada pertengkaran yang terjadi karena tidak meratanya pembagian air. Desa memilih enam pengurus, satu untuk tiap saluran, untuk mendistribusikan air. Masing-masing petani menyumbangkan 10 kg/ha hasil panennya kepada pengurus untuk mengelola sistem tersebut. Separoh dari kontribusi ini diperuntukkan untuk pengurusan dan pembersihan saluran air dan untuk digunakan bagi keperluan upacara keagamaan. Jadi sebak memainkan peran kuat dalam pemeliharaan dan pengelolaan sistem pengairan dan saluran air maupun dalam tahap perencanaan.

2.2. Pembangunan organisasi

Organisasi penting adanya untuk menjamin adanya partisipasi petani dalam proyek. Suksesnya proyek ini sebagai contoh dari pembangunan partisipatif adalah karena kuatnya organisasi petani. Antara tahun 1992 sampai 1994 sebuah survey pencarian fakta dilakukan atas kelompok tani yang beroperasi di delapan desa yang dilibatkan dalam proyek. Untuk tiap-tiap kelompok, survey menemukan ada namanya, ada pimpinan kelompok, susunan keluarga, komposisi pemilikan lahan dan nama-nama kelompok etniknya. Data ini memungkinkan pendekatan yang tepat untuk kegiatan berikutnya, termasuk organisasi berbagai kelompok tani dan penyuluhan pertanian bagi petani.

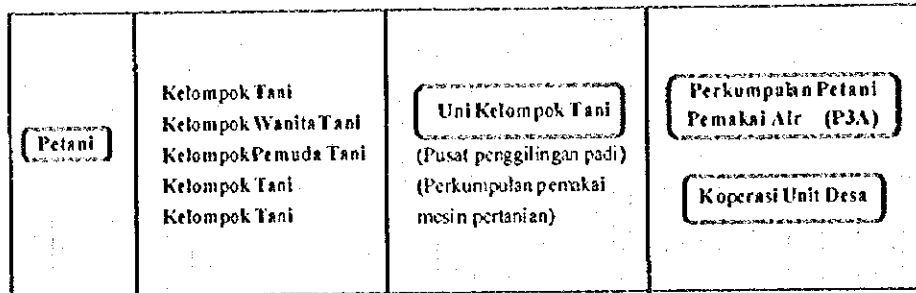
Pada tahun 1996 sebuah penelitian singkat mengenai wanita petani dilakukan di delapan desa, yang dilaksanakan oleh peneliti khusus dalam bidang ini. Penelitian ini menunjukkan sifat dan struktur organisasi wanita di delapan desa dimana proyek tersebut terdapat. penelitian rinci dilakukan atas wanita di organisasi tani wanita di empat desa (Ranometo, Onewila, Kiaea dan Lalobao), mengkaji komposisi keluarga mereka, jumlah/luas lahan yang dimiliki, tanaman apa yang mereka tanam, cara hidupnya, pendidikan, asal usulnya, keanggotaan kelompok dan kegiatan utamanya.

Juga pada tahun 1986 dilakukan penelitian tambahan untuk memperkuat kelompok tani di desa Sabulaka dan Ranometo, yang merupakan pusat pekerjaan proyek. Selain butir di atas, diteliti pula berapa jumlah ternak masing-masing penduduk, alat pertanian yang mereka pakai, peralatan rumah tangganya dan peralatan lainnya dan juga penjualan hasil pertanian dan pendapatan keluarga. Survey ini menunjukkan keadaan senyatanya dari petani di delapan desa dalam proyek tersebut dan dibantu dalam menguatkan organisasi petani.

Peningkatan infrastruktur pedesaan seperti reklamasi lahan, fasilitas irigasi dan jalan pertanian menghasilkan terciptanya kelompok baru petani, wanita dan anak muda, atau penguatan kelompok-kelompok yang ada, di masing-masing desa. Pembuatan saluran irigasi mengakibatkan terbentuknya Himpunan Pengguna Air di masing-masing desa. Wakil dari masing-masing kelompok bersatu membentuk kelompok dan serikat tani dan organisasi-organisasi ini sanggup mengelola operasi pusat penanganan beras (*rice polishing stations*), penggunaan mesin mesin

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

pertanian dan fungsi-fungsi lainnya. perkumpulan ini menjadi inti untuk pembentukan KUD (Koperasi Unit Desa) di masing-masing desa.



Gambar 4-3 Bagan Organisasi Proyek Terkait

2.2.1. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan organisasi kunci di desa, satu kelompok yang biasanya beranggotakan 20-30 rumah tangga. Dalam hal penggarapan lahan padi dengan irigasi, kelompok juga bisa diciptakan diantara masing-masing pengguna saluran. Pada umumnya kelompok tani bertindak sebagai unit tunggal dalam hal urun pendapat dan komunikasi teknik pertanian, perencanaan tanaman, operasi bersama, pengelolaan air dan fungsi-fungsi lainnya. Karena itu dalam proyek masing-masing kelompok menyediakan stok dana yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan untuk penggalian saluran air, dsb. Kelompok ini dapat menggunakan dana tersebut sesuai rencananya untuk tujuan-tujuan yang produktif (misalnya membeli bibit, pupuk, dsb). Bila ada anggota yang menggunakan dana tersebut, mereka membayar bunga sekitar 10% pertahun untuk jumlah yang mereka gunakan.

Jumlah kelompok tani di delapan desa yang diteliti dalam proyek ini meningkat dari 46 pada tahun 1996 menjadi 68 dalam lima tahun berikutnya. Kelompok-kelompok tani ini sekarang menyimpan dana mereka di bank setempat atau di kantor pos. bagi petani, inilah biasanya mereka pertama kali berhubungan dengan bank. Pengalaman penggunaan dana semacam ini untuk melaksanakan proyek yang telah mereka rencanakan untuk mereka sendiri, ketimbang bergantung pada pinjaman atau bantuan, sering merupakan langkah pertama dalam pembangunan petani menuju kemandirian di kemudian hari.

2.2.2. Kelompok Wanita Tani /KWT, Kelompok Tenaga Tani /KTT

Aktivitas proyek di delapan desa, khususnya skala kecil dan proyek bantuan lainnya seringkali merupakan titik awal terbentuknya kelompok tani. Kini ada 29 kelompok KWT dan 13 kelompok KTT. Proyek mini ini biasanya menangani teknik pembibitan, pemupukan, kimia, alat-

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

alat kecil dan bahan-bahan untuk kegiatan seperti kebun percontohan, peternakan skala kecil dan proses pengolahan jambu mete.

Kelompok ini belajar cara kerja sama membuat perencanaan dan pelaksanaan proyek melalui aktivitas bersama. Sejumlah kelompok KWT telah melakukan penggarapan sayur-sayuran untuk meningkatkan gizi keluarga wanita dan memberi mereka hasil untuk dijual di pasar. Dari pendapatan ini mereka sanggup membangun tabungan mereka dan memulai kegiatan "arisan", semacam kegiatan serikat kredit atau kumpulan pinjam meminjam sesama anggota.

Pada tahun 1995 dan 1996, tiga wakil KWT dan seorang wanita pekerja pendidikan lapangan dari masing-masing desa turut dalam pelatihan lapangan di Lombe, kabupaten Buton dimana mereka dilatih untuk mengolah mete. Sekembalinya ke desa peserta pelatihan akan membagikan pengetahuan yang didapatnya ke-sesama anggota kelompok. Metoda ini meningkatkan dengan cepat keahlian penanganan mete dan mete dijual di pasar di daerah ini.

Dengan praktek ini, seorang pekerja dapat menjual sekitar 3 kg mete dalam sehari untuk biaya pengolahan sebesar Rp. 1.000. Ini memberikan keuntungan tambahan atas penjualan mete yang tidak diolah. Pelatihan ini banyak benar dampaknya dan telah memberikan dukungan jangka pendek dan bantuan dengan upah dan penjualan, sehingga penduduk mulai sanggup mandiri.

2.2.3. *Perkumpulan Petani Pemakai Air : P3A (Water Users' Association)*

Di tujuh desa selain Raca, yang tidak memiliki persawahan padi, pembangunan irigasi dan fasilitas drainasi telah diikuti dengan terbentuknya P3A yang bertugas memelihara fasilitas dan mengelola sumber air sesuai dengan pengarahan dari P.U tingkat propinsi. Desa-desa di Lalobao, Sabulakoa dan Onewila merupakan tempat bagi sebagian besar penduduk asli Tolaki. Tolaki tidak berpengalaman dalam irigasi sawah padi, dan juga semua pekerja pendidikan lapangan adalah warga asli masyarakat Tolaki, jadi sangat sulit untuk mengajarkan penggunaan air dan penggarapan sawah dalam waktu singkat. Bagi penduduk desa, pengenalan suatu teknik bercocok tanam baru seperti persawahan dipandang sebagai suatu revolusi sosial.

2.3. *Bimbingan dan Penyuluhan*

Bimbingan dan Penyuluhan termasuk pengarahan jangka panjang dan jangka pendek, adalah hal esensial demi kelancaran dan efisiennya proyek yang menggunakan aktivitas terorganisir petani. Khususnya manajemen organisasi yang menangani stok dan dana tunai akhirnya sangat sukar bagi mereka yang tidak berpengalaman dalam hal tersebut. Mereka yang bertugas harus mendapat bimbingan.

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

Caranya misalnya dengan diikutkan tour atau kunjungan ke masing-masing desa oleh ahli yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan saran yang perlu atas masalah-masalah seperti pengoperasian penanganan beras atau himpunan pengguna mesin pertanian. Kunjungan ahli ini bisa oleh pekerja pendidikan lapangan, ahli proyek, staf dan orang lainnya yang terlibat.

Bimbingan biasanya menghasilkan hasil dalam hal seperti masalah tentang honor yang tidak ditagih, panjar dari stok dana untuk membeli suku cadang, koreksi pembukuan, dan pengenalan sistem kartu baru bagi setiap pengguna stasiun/pusat penanganan beras tersebut.

2.4. Pandangan ahli mengenai keadaan partisipasi petani (intisari dari laporan pendapat ahli)

Sampai saat ini pola umum bantuan teknik ialah dengan cara alih pengetahuan dari ahli kepada orang lain. Orang dalam dalam hal ini adalah kelompok tani dan proyek disampaikan/dijelaskan kepada mereka itu dalam pertemuan-pertemuan sebelum proyek dilaksanakan. Ide-ide konstruktif petani ditampung dalam tahap perencanaan. Dalam proyek ini, tiga kelompok ahli, konterpart dan petani digantikan dengan sebuah kelompok diskusi yang menyatukan ketiga bagian tadi. Hal-hal yang berhubungan laju pelaksanaan proyek ditentukan oleh kelompok diskusi ini, yaitu dengan cara musyawarah, metoda bentuk-konsensus tradisional. Kelompok ini dibentuk pada tingkat dusun kecil, yang merupakan unit terkecil perkumpulan pedesaan di Indonesia. Masing-masing baranggotakan 20-30 oran, yang merupakan luas optimum untuk melaksanakan pengamatan atas fungsi dusun kecil.

Pendapat kaum wanita diberi titik berat terbesar dalam pemilihan lokasi sumur bersama karena wanitalah pengguna utama sumur tersebut. Pembentukan dan pengelolaan dana stok didasarkan pada kesepakatan dari semua petani yang dilibatkan, meskipun diperlukan sedikit pengarahan untuk itu. Ini memberikan motivasi yang baik untuk turut berpartisipasi dalam proyek-proyek lainnya.

Cara lainnya petani berpartisipasi ialah dengan memberikan tenaga mereka dalam pembangunan saluran irigasi dan sarana lainnya. Bentuk partisipasi ini menguatkan ikatan di antara kelompok-kelompok tani dan meningkatkan kesadaran mereka akan hak milik atas lahan yang mereka kerjakan dengan keras dan partisipasi di dalamnya. Ketika membuat keputusan desain tentang aspek-aspek penyempurnaan sarana pertanian, seperti misalnya apakah harus membangun irigasi dengan batu atau menggunakan balok untuk membangun jembatan untuk jalan menuju pertanian, sebisa dan semaksimal mungkin diusahakan dari bahan apa yang tersedia didesa yang dapat dengan mudah diperbaiki jika diperlukan kemudian.

Pekerjaan kelompok tani harus dimulai jika timbul kebutuhan kemudian. Pekerjaan kelompok tani harus dimulai dengan proyek skala kecil yang akan menciptakan ikatan di dalam kelompok itu

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

dan kemungkinan gagalnya kecil. Pengalaman sukses ini akan meningkatkan kegiatan kelompok selanjutnya.

3. Cita-cita pembangunan partisipatif di kemudian hari

3.1. Konsep kunci di kemudian hari pembangunan pertanian dan pedesaan

Sikap pada bantuan pembangunan pertanian dan pedesaan di negara berkembang telah bergeser mengingat pengalaman pahit negara maju dalam rangka pembangunan masyarakatnya dan atas dasar pengalaman/pelajaran yang didapat dari bantuan pembangunan sebelumnya kepada negara-negara berkembang. Tema seperti “pembangunan yang sangat berkelanjutan” dan “pembangunan selaras dengan lingkungan” mulai diterapkan, dan pertanyaan seperti “siapa yang bertugas menangani proyek?”, “sedang melakukan apa mereka itu?” dan “bagaimana mereka akan melakukan itu?” dikaji ulang sehingga ditemukanlah pembangunan partisipatif, dimana dalam pola ini petanilah yang menjadi pelaku peran sentral”. Lihat Tabel 4-2 mengenai pelajaran yang dipetik dari Kecenderungan dalam pembangunan sejak 1960-an.

Tabel 4-2 Pelajaran yang di gambarkan dari Kecenderungan

Periode	Strategi pembangunan	Masalah
1960	Diawali oleh perbaikan prasarana Pengenalan dana dari luar Pengenalan keterampilan dari luar Kepercayaan kepada teori trickle-down (pelan tetapi terus) Nasionalisme	Timbulnya kemiskinan Peningkatan perbedaan pendapat-an
1970	Pertemuan kebutuhan dasar manusia Pembangunan berdampingan dengan lingkungan Pembangunan pedesaan secara menyeluruh Target untuk kaum miskin	Timbulnya kemiskinan Ketidak memadainya kemampuan instansi pelaksana Tidak ada janji konterpart pemerintah Kebijaksanaan makroekonomi yang tidak memadai Kerusakan lingkungan Pertumbuhan rendah
Awal 1980	Penyesuaian struktur Ekonomi pasar dan privatisasi Pengurangan peranan ekonomi negara Partisipasi LSM Target untuk kaum miskin	Penumpukan hutang dan pertumbuhan rendah Posisi ekonomi yang buruk untuk kaum miskin Kemerostan lingkungan
1990	Penyesuaian struktur Ekonomi pasar dan privatisasi Pembangunan partisipatif Konservasi lingkungan dan pengendalian penduduk Jaminan perlindungan manusia Target untuk kaum miskin Partisipasi LSM Pemerintah yang baik	Penumpukan hutang dan pertumbuhan rendah Peningkatan kemiskinan dan dilokali-sasi Kemerostan lingkungan Kemerostan posisi fiskal negara donor Perselisihan etnik

Tabel tersebut menggambarkan bagaimana pengalaman dihimpun sebagai sewaktu kebijaksanaan bantuan diterapkan. Kebijakan dan strategi perlahan-lahan ditingkatkan sesuai dengan pengalaman ini dan diterapkan ke proyek berikutnya, bila sesuai. Motto kunci strategi pembangunan tahun 1990-an ialah “Swastanisasi dan ekonomi pasar”, “pembangunan

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

partisipatif”, “pemberdayaan yang dapat menopang pemerintahan yang baik” dan “Pembangunan manusia dengan titik berat pada proses pembangunan”. Karena itu, “Tujuan survey pembangunan pertanian dan pedesaan” yang akan diikuti akan mengikuti motto kunci ini, dengan perhatian khusus pada tiga poin kunci, yang menyatukan strategi pembangunan pokok, yaitu:

- Upaya menghilangkan kemiskinan, termasuk masalah Wanita dalam pembangunan dan masalah gender
- Pelestarian lingkungan
- Dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bentuk dana bantuan pembangunan akan bergeser dari pola lama yaitu pola dimana pembangunan ditentukan oleh pemerintah untuk perbaikan infrastruktur, dialihkan ke pola pembangunan partisipatif, Langkah ini akan ditopang oleh pembangunan yang menitik beratkan prinsip-prinsip pasar (permintaan dan penawaran dan persaingan harga) dan kegiatan sektor swasta yang dipusatkan pada pembangunan manusia.

Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan badan-badan bantuan internasional menitik beratkan pada titik-titik yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini dalam survey pembangunan pertanian dan pedesaan. Poin terpenting mencakup “pertimbangan tentang Wanita Dalam Pembangunan dan kaum miskin”, “pendekatan pembangunan partisipatif”, “penguatan organisasi dan pelatihan personil” dan “pertimbangan tentang dampak lingkungan”. Pelajaran dari pengalaman mengenai titik-titik ini penting sekali artinya dalam survey di kemudian hari untuk membantu merancang rencana pembangunan yang sangat berkelanjutan, yang siap diterapkan pada benefisiar dan praktis.

Tabel 4-3 : Tugas kunci disediakan oleh Perwakilan Bantuan Internasional dalam Survey Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

1) Memperhatikan WID (Pembangunan Wanita) dan kaum miskin	Ambisi dalam mencapai target Organisasi wanita Peningkatan gizi Pembiayaan pada wanita Dukungan finansial untuk mendapatkan pekerjaan Memonitor status kemiskinan Pendidikan dan pelatihan wanita
2) Pembangunan partisipatif	Organisasi penerima pembangunan Dana yang dikeluarkan oleh penerima pembangunan Peningkatan jumlah penerima pembangunan pada semua tingkat Pelaksanaan analisa sosial
3) Pelatihan personel	Pelatihan keterampilan Pelatihan dalam keterampilan manajemen Pendidikan pelayanan pertanian di lapangan Reset terpakai
4) Pemberdayaan organisasi	Pembentukan sistem pemrosesan data Pembentukan dan pemberdayaan organisasi Penetapan aturan dan standar

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

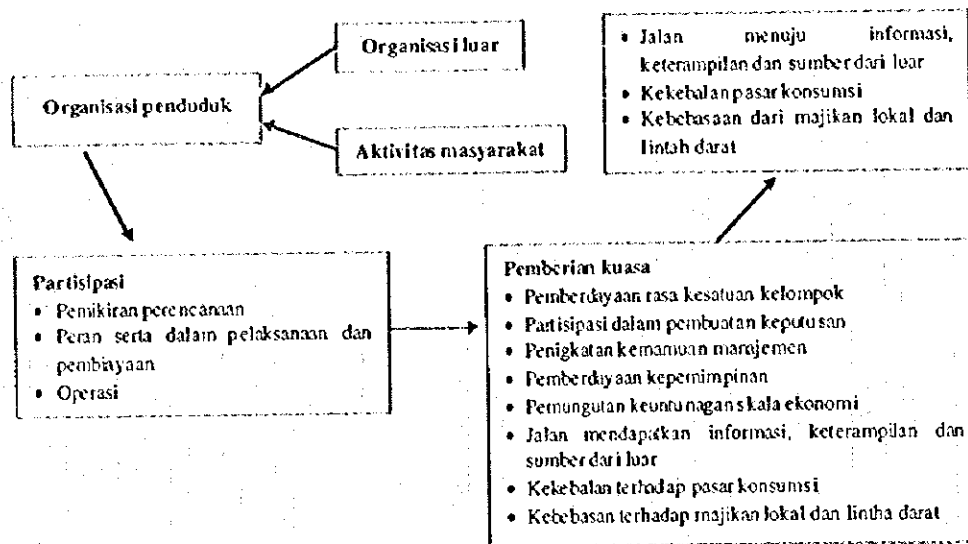
	Struktur ulang Partisipasi LSM Pembentukan dan pemberdayaan organisasi reset pertanian Pembentukan dan pemberdayaan P3A Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan pelatihan organisasi Pembentukan dan pemberdayaan kelompok tani Pembentukan dan pemberdayaan koperasi pertanian Privatisasi Pembentukan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk ekonomi pasar Pembentukan akutansi dan sistem audit (pengawasan)
5) Pertimbangan terhadap lingkungan	Konservasi tanah Penilaian lingkungan Observasi tepat standar lingkungan Kampanye pendidikan mengenai konservasi lingkungan Monitor lingkungan Pemilihan pupuk kimia yang aman Pelarangan penggembalaan Perlindungan sumber air Pemberantasan hama menyeluruh Membuat petunjuk lingkungan Mempekerjakan "G-man" lingkungan Penanaman pohon Agro-kehutanan Peningkatan sistem pencatatan lahan Pembentukan sistem informasi lingkungan Membuat rencana induk peningkatan lingkungan
6) Pendanaan desa	Penetapan aturan dan standar
7) Monitoring dan evaluasi	Survey dampak penerima pembangunan Studi dasar Evaluasi menengah

Butir selanjutnya harus selalu diingat dalam perencanaan pembangunan di hari mendatang ialah bahwa penduduk setempat harus dilibatkan dalam pelaksanaan proyek.

Organisasi benefisiar untuk pelaksanaan proyek pengembangan adalah suatu syarat awal yang perlu untuk partisipasi dan pemberdayaannya, dan untuk mencapai efek proyek yang berkesinambungan.

Dukungan dari organisator luar (organisasi sosial, dsb.) penting dalam pengorganisasian penduduk. Ini mendukung kelompok sasaran yang potensiil menjadi aktivitas masyarakat. Jika masyarakat tidak menerima upaya dan saran-saran organisator luar sebagai strategi dasar pembangunan, tidak perlu mengulang lagi. Titik berat persetujuan masyarakat bagi pembangunan merupakan syarat utama bagi pembangunan berbasis masyarakat.

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan



Gambar 4-4 Proses Pembangunan Pokok sebagai Organisasi yang Terkait kepada Penduduk

Jika bentuk organisasi semacam ini terbentuk (lihat gambar 4-4), maka peran serta penduduk akan lancar sehingga memungkinkan mereka itu memainkan peran sentral dalam masalah perencanaan, pembangunan, biaya bersama, pengoperasian dan pengelolaan dan aspek-aspek lainnya dari proyek. Dengan suksesnya partisipasi, penduduk akan merasakan rasa persatuan dan meningkatkan kepemimpinan mereka, kesanggupan manajemen dan akses pada sumber, selain keuntungan lainnya. Kemandirian sosial ekonomis mereka menjadi mungkin dan akibatnya mereka menjadi semakin berdaya. Pemberdayaan ini, yang maksudnya ialah meningkatkan kemandirian penduduk, akan membangun swadaya sosial ekonomi, melibatkan mereka secara aktif dalam pekerjaan pelestarian lingkungan dan akibatnya, mendukung keberlanjutan/kesinambungan proyek. Proses pembangunan pokok sebagaimana dilihat dalam pengorganisasian penduduk, digambarkan dalam gambar 4-4.

Pada umumnya jarang suatu proyek dilakukan mulai dari kertas kosong di suatu negara yang mutlak tidak berpengalaman dalam jenis proyek yang diteliti. Dalam sebagian besar kasus, beberapa proyek semacam ini telah dilaksanakan di sana sini dan dalam skala tertentu dengan bantuan pada negara berkembang sejak Perang Dunia ke-II. Karena itu bila survey perencanaan pembangunan dilakukan, maka harus diteliti apa saja persoalan dan upaya yang akan efektif, dan proses harus mencerminkan pengalaman pemerintah dan penerima pembangunan di negara berkembang. Pengembangan tehnik yang didapat dari pengalaman tersebut harus dibangun ke dalam kerangka dasar proyek.

3.2. Konfirmasi komitmen pemerintah dan evaluasi keterandalan

Masalah “Untuk Siapa Proyek Itu?” dan “Siapa Yang Harus melaksanakan Proyek?”, yakni “Siapakah badan Yang paling Penting dalam Proyek tersebut?” biasanya harus dirumuskan dengan jelas sebagai unsur terpenting dari “konsep proyek” ketika proyek sedang dibentuk.

Sering ada kecurigaan bahwa satu-satunya kriteria untuk mencerminkan komitmen pemerintah pada proyek adalah “apakah mereka punya uang untuk pembangunan proyek atau dapatkah mereka memperolehnya?” dan “apakah personil yang akan mengerjakan pembangunan itu memadai?”. Di waktu mendatang, evaluasi harus didasarkan pada pertimbangan yang jauh lebih luas, termasuk unsur-unsur seperti “apakah kebijaksanaan dan sistem untuk pembangunan tersebut tepat?”, “apakah pembangunan tersebut cukup mencerminkan sasaran kebutuhan masyarakat?” dan “sudahkah didapat persetujuan penduduk untuk pembangunan tersebut, dan “dapatkah mereka mengekspresikan tuntutan tersebut?”

Di waktu yang lalu, pendekatan pokok yang dilakukan adalah “top-down”, yang dipimpin oleh pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah, sehingga tidak banyak diberikan perhatian kepada benefisiar pembangunan. Di waktu mendatang, komitmen ini adalah suatu faktor yang akan mempunyai dampak penentu terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Karena itu, dalam pelaksanaan rencana pembangunan di hari mendatang, peran serta secara independen dari benefisiar dalam pembangunan dan sikap pemerintah untuk meningkatkan partisipasi tersebut harus diambil sebagai indikator penting tentang komitmen positif pemerintah.

3.3. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam survey pencarian fakta

3.3.1. Pemahaman masalah dan kebutuhan secara tepat

Rencana pembangunan harus menetapkan kerangka untuk memenuhi kebutuhan benefisiar, yang didasarkan pada pemahaman akan kebutuhan politik dari pemerintah negara bersangkutan. Hal itu juga harus didasarkan pada pengertian bersama atau kesepakatan antara badan pelaksanaan yang akan melaksanakan pembangunan dan masyarakat bersangkutan. Di waktu yang lalu pelaksanaan sepenuhnya prinsip ini untuk menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dengan benefisiar sangat membutuhkan waktu banyak dan seringkali sangat sukar menyelesaikan masalah dalam periode waktu survey yang singkat. Hasilnya ialah melibatkan benefisiar agar sesuai dengan kebijaksanaan yang didasarkan pada kebutuhan politik pemerintah.

Dalam sebuah penelitian dasar untuk menemukan kebutuhan benefisiar, kebutuhan nyata bisa tidak sepadan dengan situasi sebagaimana dipandang badan pelaksana di lapangan. Karena itu dari pada hanya mendasarkan diri kepada informasi dan penilaian pemerintah, kelompok survey harus mengupayakan kemandirian dan penggunaan survey untuk memastikan kembali fakta dengan cara

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

menginterview penduduk, studi garis pokok dan metoda lainnya. Metoda survey berikut ini dapat digunakan:

- 1) Survey sosial orthodox dan sensus masalah secara acak/random sampling (untuk mendapatkan pemahaman melalui dengar pendapat dari penduduk di daerah proyek mengenai masalah dan kebutuhan yang dirasakan, atau diskusi kelompok dengan penduduk).
- 2) Rapid Rural Appraisal, yang merupakan metoda penilaian sederhana. Dari pada hanya menggunakan metoda sample statistik, cara ini memungkinkan berbagai ahli untuk mengambil sample semanya, dengan menggunakan dengar pendapat dan metoda lainnya untuk mendapatkan pemahaman akan kondisi sosial dalam bidang proyek yang dikaji.
- 3) Studi kependudukan jangka panjang

Metoda yang sesuai dapat dipilih agar sesuai dengan situasi ini. Ada metoda ke-empat yang masih untuk survey semacam ini :

- 4) Project Cycle Management (PCM). Metoda ini dirakit untuk membantu kemajuan proyek pembangunan partisipatif. Dalam tahap awal suatu proyek, dibentuk komunikasi dengan penduduk melalui lokakarya dan peristiwa-peristiwa lainnya. Salah satu keuntungannya ialah bahwa dengan cara ini akan terbentuk persepsi umum penduduk yang dilibatkan dalam proyek dan mereka mau membangunnya.

Cara bagaimana kebutuhan ditentukan oleh survey pembangunan sangat menentukan arus bantuan pembangunan. Karena itu hal yang paling penting dipertimbangkan ialah, metoda apakah yang akan digunakan untuk mengetahui kebutuhan penduduk tersebut.

Dalam proses ini perlu sekali diuji bahwa kebutuhan nyata haruslah seksama dan seimbang bila dilihat dari berbagai sudut pandang. Survey ini harus bisa menemukan apa yang menjadi kebutuhan penduduk setempat menurut pertimbangan mereka.

3.3.2. Kebutuhan pembangunan partisipatif

Keuntungan utama dari pembangunan secara partisipatif ialah bahwa dialog dengan penduduk terjadi secara berulang-ulang, mulai dari tahap survey pembangunan, yang memberikan pemahaman yang seimbang akan berbagai kebutuhan. Proses ini menghasilkan terbentuknya konsensus pada tahap awal perencanaan di antara mereka yang terlibat (unsur pemerintah, penduduk dan badan bantuan) pada skenario pembangunan yang paling diinginkan. Awal dari

proses ini menghasilkan tumbuhnya pemberdayaan. Dalam banyak kasus, kebutuhan pembangunan timbul dari berbagai situasi yang digambarkan di bawah ini:

- 1) Kurangnya dana untuk fasilitas dan bahan konsumable
- 2) Kurangnya pelayanan fisik dan pelayanan manusia (termasuk pelatihan)
- 3) Adanya sumber daya manusia yang tidak atau kurang dimanfaatkan.
- 4) Bebas dari efek bencana alam.
- 5) Keharusan kebijaksanaan nasional, seperti swadaya pangan.

3.3.3. Survey sosial dan pertimbangan sosial dan merancang rencana

Di masa lalu sebagian besar survey pembangunan hanya menitik beratkan pembangunan prasarana, jadi hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang "keras". Ini mengakibatkan terjadinya pembangunan tanpa melibatkan penduduk yang akan dibangun/ benefisiar, sehingga hasilnya pun hanya bertahan singkat/rendah kesinambungannya. Seperti telah dikemukakan di atas, pembangunan di masa datang harus didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan ramalan yang pantas harus dibuat mengenai apa efek proyek di kemudian hari terhadap penduduk/benefisiar dan apa dampaknya. Ini membuat "studi tentang kaitan antara masyarakat dan lingkungan" dan "analisa serta evaluasi masalah sosial" adalah unsur yang tidak bisa dielakkan dalam survey pembangunan.

Tujuan survey sosial dan analisa serta evaluasi unsur-unsur sosial dalam survey pembangunan ialah untuk menentukan apa dampak yang akan diakibatkan oleh pembangunan terhadap benefisiar (masyarakat luas) dalam area proyek, dan kemudian, bagaimana proyek dapat dilaksanakan dengan efektif.

(1) Isi survey sosial

a) Mengidentifikasi kelompok masyarakat

Dalam banyak kasus, masyarakat di negara berkembang sering dipandang sebagai suatu masyarakat yang secara sosial homogen. Padahal dalam kenyataannya mereka itu terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dan ada banyak faktor internal yang dapat memicu antagonisme diantara mereka itu, tergantung pada bagaimana caranya proyek dilaksanakan.

Karena itu teknik ini membutuhkan pertimbangan yang dekat ketika melakukan survey pembangunan. Jenis-jenis masyarakat bisa secara garis besar digolongkan kedalam enam

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

model seperti di bawah ini. Singkatnya, masyarakat lokal itu bukanlah sesuatu yang sederhana dan homogen.

- 1) "Pemilikan tanah dan kelompok bagi hasil", "manajer dan buruh di pabrik-pabrik pedesaan", dsb., digolongkan sesuai dengan perbedaan dalam pemilikan harta dan sumber-sumber, termasuk tanah.
- 2) Kelompok tani dan kelompok usaha kecil, yang digolongkan menurut pekerjaan mereka.
- 3) Kelompok pria dan wanita, yang digolongkan menurut jenis kelamin
- 4) Kelompok etnik yang terbentuk berdasarkan perbedaan etnik
- 5) Kelompok lainnya seperti Kristen, Muslim, Budha dan lainnya berdasarkan agama
- 6) Lapisan masyarakat menurut usia

b) Definisi benefisiar dan kelompok masyarakat

- 1) Mengidentifikasi semua benefisiar dan kelompok masyarakat
- 2) Merumuskan sub kelompok dengan kebutuhan yang berbeda, kebutuhan pembangunan dan tingkat penerimaan (receptivity), misalnya pemilik lahan luas, sedang, dan kecil, penggarap, buruh tani, nelayan, pedagang, usaha tani, buruh pabrik, dsb.).
- 3) Menyiapkan profil sosial ekonomi sub kelompok di atas (penduduk, kebutuhan, kebutuhan pembangunan, receptivity, perbedaan gender, pekerjaan, harta, pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, besar keluarga, kebudayaan, agama, suku, dsb.).

c) Mengidentifikasi kebutuhan sub kelompok yang harus mendapatkan keuntungan pembangunan

Kebutuhan (penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, diversifikasi produksi, peningkatan nilai tambah, produktivitas yang berkesinambungan, angkutan, penyimpanan hasil panen, pengolahan, dsb.) dari sub kelompok tersebut yang akan mendapatkan keuntungan dari suplay pangan dan bertambahnya pendapatan karena pembangunan pertanian harus diidentifikasi dan diverifikasi melalui diskusi dengan sub-sub kelompok tersebut.

d) Menentukan reseptivitas pada pembangunan diantara sub-sub kelompok

- 1) Mengevaluasi apakah sub kelompok tersebut siap untuk menerima beban operasi dan biaya pengelolaan dan pemeliharaan proyek, dsb, yang menyertai keuntungan yang akan didapat dari pembangunan (asset dan pelayanan seperti air irigasi, perbaikan strain tanaman, jasa pendidikan, keuangan pertanian, pupuk dan kimia pertanian, dsb.). Juga

mengevaluasi apakah sub-sub kelompok tersebut mempunyai kemauan dan kesanggupan untuk melaksanakan dan menyetujui sistem produksi baru yang mungkin akan diintroduksi (keahlian yang berhubungan dengan produksi dan peraturan mengenai penggunaan sumber daya, seperti sistem penanaman terencana/planned cropping system).

- 2) Mengkaji upaya pembangunan yang telah dilakukan masyarakat dan meneliti efeknya.
- 3) Menaksir kesempatan apa terbuka yang akan dihasilkan oleh pembangunan, dan meneliti kemungkinan dampak pembangunan terhadap sistem produksi masyarakat penerima proyek, potensi penggunaan tanah secara berkesinambungan, sumber dari air dan hutan, penggunaan mesin, penggunaan pupuk dan kimia pertanian, penggunaan bibit). Kajian harus mencakup dampaknya terhadap pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

(2) Analysis dan evaluasi faktor-faktor sosial penting

- a) Memprakirakan reaksi setiap kelompok terhadap proyek

Dalam suatu masyarakat desa di negara berkembang yang terdiri dari berbagai masyarakat seperti diuraikan di atas, bahkan dalam proyek yang direncanakan untuk mengairi lahan pertanian, harus diramalkan segala reaksi yang mungkin dari masyarakat dan disiapkan upaya untuk mengatasinya.

Ada berbagai jenis reaksi terhadap suatu proyek, tergantung pada faktor-faktor seperti skala irigasi, rencana penempatan luas saluran irigasi dan jenis produksi pertanian yang akan ditanam setelah lahan diirigasi. Perbedaan-perbedaan dalam reaksi ini dapat timbul, misalnya diantara pemilik tanah dan penggarap. Akses pada pelayanan sosial juga berbeda sesuai dengan nilai asset yang dimiliki, dan perbedaan ini dapat dengan mudah menghasilkan suatu situasi dimana si "kaya" mendapatkan berbagai keuntungan sedang "si miskin" merasa dirugikan. Begitu juga agen pembeli bisa mendapatkan kredit dari bank pemerintah, sedang petani, terutama penggarap, di negara berkembang sangat sukar untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jika kondisi ini bertahan, penggarap tidak akan beruntung dari proyek irigasi. Selanjutnya, keuntungan pertanian dari irigasi itupun akan lebih banyak mengalir ke si pemilik tanah dan agen pembeli (toke-toke, pen) karena mereka itu dapat memperoleh kredit bank sehingga bisa mengembangkan usahanya. Meskipun proyek juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi tuan tanah dan toke-toke, tidak demikian halnya dengan penggarap bagi hasil (sharecropper).

Dengan cara ini, bila dinilai isi proyek yang diajukan hanya akan menguntungkan kelompok tertentu dan tidak memberikan keuntungan bagi kelompok lainnya, maka akan

kecil kemungkinan kerja sama dari semua pihak dalam bidang tersebut.

Jika proyek dilaksanakan dalam kondisi seperti itu, “benefisier” yang tidak mendapatkan keuntungan, dan mereka yang mendapatkan keuntungan tidak memadai, akan merasa tidak puas, dan ketidakpuasan ini dapat berakibat menghambat terhadap pelaksanaan proyek, setidaknya ada sikap menentang terhadap proyek tersebut. Ini malah bisa berakibat keberhasilan proyek tersebut disangsikan. Karena itu konsensus atas proyek harus diusahakan secepat mungkin antara kelompok-kelompok yang menerima dampak yang berbeda-beda dari proyek tsb. Inilah alasan selanjutnya mengapa analisa sosial mengenai unsur yang penting dari evaluasi menyeluruh dan analisa yang dilakukan dalam survey pembangunan.

- b) Evaluasi reseptivitas sub kelompok benefisier
 - 1) Memastikan akan pembangunan akan mempunyai dampak besar terhadap kebiasaan sosial dan struktur produksi (misalnya, pergeseran dari pertanian biasa menuju pertanian extensif dalam bidang tertentu). Juga mengecek apakah masyarakat serupa di waktu yang lalu telah berhasil menyesuaikan diri kepada perubahan tersebut atau tidak. Adanya alternatif resiko rendah berdasarkan sistem yang ada harus juga diteliti.
 - 2) Persepsi dan sikap sub kelompok pada perubahan yang diharapkan akan dihasilkan oleh pembangunan harus disuarakan melalui pertemuan dan diskusi. Periksa apakah kelompok tersebut pernah diberikan semua informasi yang mereka perlukan agar bisa memahami secara seksama perubahan yang akan dibawa oleh proyek (sampai sejauh mana perubahan yang diakibatkan, berapa tambahan biaya, apa keuntungannya, resikonya dan kewajiban yang ditimbulkan). Mekanisme terbaik untuk pelatihan dan media yang tepat untuk penyampaian informasi harus ditentukan agar bisa menyebarkan keahlian baik kepada yang melek huruf maupun yang buta huruf.
 - 3) Pastikan apakah tanaman yang diajukan dan keahlian produksi serta permintaan pasar yang diharapkan akan cukup untuk menjustifikasi investasi petani.
 - 4) Periksa/pastikan apakah organisasi petani dan organisasi sosial lainnya ada. Evaluasi apakah sub kelompok dengan organisasi yang berbeda terwakili secara memadai dan apakah organisasi ini mempunyai kekuatan dan kemampuan manajemen yang diperlukan untuk mendukung pelayanan pertanian dan pembangunan pedesaan atau tidak.
 - 5) Memastikan bahwa tokoh keagamaan akan mendukung pembangunan itu atau tidak. Alasannya mengapa pembangunan tidak mendapat dukungan dan efek yang diharapkan dari tiadanya dukungan tersebut, harus dianalisa dan dievaluasi.
 - 6) Mengevaluasi keyakinan dan kebiasaan sosio kultural, seperti penggantian pola tanam karena makna ritual dari suatu tanaman, pemilihan tanah dan tanggung jawab oleh

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

penolakan kerabat pada kredit sehubungan dengan tradisi tolong menolong, yang dapat membatasi kebutuhan pembangunan.

- 7) Meneliti tingkat pengguna kredit, masyarakat mereka dan tingkat perolehan kembali biaya.

c) Analisa gender

- 1) Status peranan jenis kelamin dan pembagian kerja dalam bidang sistem produksi pertanian, pada komunitas dengan berbagai sub kelompok, kesempatan kerja di sektor non pertanian, anggaran keluarga dan pengolahan skala bersih produksi pertanian dan pemasarannya, jaminan pangan dalam anggaran keluarga dan sistem produksi pertanian harus diteliti. Perlu juga diasumsikan bagaimana pembangunan akan mengubah peran-peran tersebut.
- 2) Kondisi jalan menuju sumber dan pelayanan seperti kredit, mesin-mesin, lahan, air, hutan, sumber, kesempatan pelatihan bagi baik laki-laki maupun perempuan akan dipelajari.
- 3) Perlu dirumuskan dan dianalisa kondisi apa yang membatasi wanita, seperti waktu, uang, melek huruf, hak finansial dan kultural serta hambatan religius untuk menghadapi perolehan akses pada sumber-sumber dan pelayanan.
- 4) Teknologi tepat guna harus dikaji dengan mempertimbangkan tujuan, baik untuk pria maupun wanita atau keduanya.

d) Dampak negatif laten

- 1) Mendefinisikan kelompok mana yang menderita kerugian, seperti misalnya perpindahan tempat tinggal, hilangnya hak sewa, berkurangnya pendapatan dan hilangnya tanah leluhur dan kuburan, karena pembangunan.
- 2) Dampak pembangunan pada kaum lemah dalam artian mutu dan jumlah yang menggambarkan profil sosio ekonomis harus dikaji secara kuantitatif sebisa mungkin.
- 3) Setiap kelompok yang mungkin dirugikan oleh dampak negatif harus dikaji berikut pilihan mengenai cara mengatasinya.
- 4) Mensuplai informasi pembangunan kepada masyarakat sedini mungkin, dan mencerminkan hasil yang dicapai melalui dialog dengan rencana pembangunan.

e) Pertimbangan pada kemiskinan dan wanita

Pertimbangan pada kemiskinan dan wanita yang sering kali lemah kedudukan sosialnya di berbagai masyarakat, penting diperhatikan dalam tahap perencanaan analisis sosial.

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

Artinya perlu diupayakan memahami keuntungan apa yang mungkin dapat diberikan kepada kelompok miskin ketika meramalkan dampak proyek kepada berbagai lapisan sosial, dan beban apa yang akan dipikul serta apa perbedaan yang ada antara berbagai lapisan sosial dalam artian keuntungan dan beban.

Kaum miskin, yang sering kurang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelayanan sosial tanpa sumber produksi yang khusus, dan mempunyai kemampuan rendah dalam memikul beban. Karena itu metoda pelaksanaan harus jelas dibuat agar beban bisa diterima atau dapat memperoleh subsidi dari kebijaksanaan administratif.

Dalam artian bahwa pemahaman yang pantas akan posisi wanita adalah esensial, karena wanita mempunyai lebih banyak beban dibanding pria dan kurang mendapat kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi penelitian yang seksama mengenai dampak proyek terhadap kaum wanita tidak boleh dilupakan samasekali. Metoda penelitian pada masalah ini dapat diterapkan pada "analisa gender". Analisa gender belakangan ini sering disebut "socio gender analysis", karena sebagian besar kelompok sosial terdiri dari wanita miskin dan analisa metoda diterapkan pada evaluasi dan analisa dampak dalam lapisan masyarakat miskin pada umumnya.

3.4. Saran-saran untuk memperkuat dan membangun organisasi wanita pedesaan

(1) Status dan masalah aktual organisasi wanita pedesaan

Faktor terpenting untuk dipertimbangkan sehubungan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi organisasi ini ialah, bahwa ada dua jenis organisasi wanita pedesaan, yaitu DW dan KWT. Program yang mempengaruhi kedua organisasi ini ialah tidak cukupnya kesadaran akan kebijaksanaan dan posisi yang tidak jelas di tingkat desa, yang mengakibatkan kegiatan kedua organisasi ini tumpang tindih. DW adalah organisasi terminal dengan liputan yang luas untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan yang dinamakan PKK, yang mencakup berbagai aktivitas. Bahkan DW sampai pada tingkat nasional yang mencakup semua pemerintah pusat. Akibatnya cenderung pedoman organisasi inipun bersifat dari atas ke bawah (top down). Kegiatannya antara lain Posyandu, kecantikan lingkungan hidup, kesehatan ibu dan anak, yang dilakukan oleh dharma wanita dan untuk skala besar oleh PKK di tingkat desa. Kegiatan yang dilakukan secara otonomi oleh dharma wanita pribadi terbatas hanya pada arisan dan kebun PKK, dan aktivitas ini pada umumnya tumpang tindih dengan aktivitas KWT.

Sebaliknya KWT adalah organisasi yang tujuan utamanya ialah pertanian. Tetapi mereka tidak mengorganisir penyuluhan untuk bidang pertanian seperti penanaman padi dan penggarapan lahan tadah hujan, tetapi terbatas hanya meningkatkan sayur-sayuran dengan skala pertanian kecil, dengan kata lain hanya pelengkap. Dalam kenyataannya wanita juga terlibat dalam banyak tugas di pertanian padi dan tadah hujan, dan ditangani wanita sebagai masalah penting dalam

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

pembangunan regional pertanian, namun unsur tersebut sering tidak dimasukkan kedalam aktivitas KWT. Selain itu KWT juga adalah organisasi pada diri mereka sendiri yang tergantung sama sekali pada pekerja luar untuk bantuan eksternal. Posisi KWT berbeda dengan KT yang mempunyai akses pada organisasi yang lebih besar seperti KUD dan P3A, yang bersifat lebih resmi dan mempunyai basis organisasional yang lebih kuat. Dalam hal ini kemungkinan pengembangan organisasional KWT terbatas sekali.

Masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi wanita ialah tidak cukupnya pemosisian kegiatan organisasi wanita berdasarkan ciri sosio ekonomis masing-masing desa dan perbedaan dalam kondisi pertanian. Dalam hal DW, program yang disusun di tingkat menengah akan dilaksanakan bertahap, dan bahkan dibiarkan tergantung pelaksana, dan pelaksanaannya sebenarnya mengikuti pengarahannya dari organisasi yang lebih tinggi, jadi aktivitas di desa hampir sama semuanya. Mengenai KWT juga, perlu mengembangkan teknik dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah dimana kondisi daerah pertanyaannya berbeda-beda. Hanya daerah tertentu yang bisa sama kegiatannya seperti pengolahan jambu mete. Sehubungan dengan kegiatan KWT, perlu dipertimbangkan beberapa operasi seperti pengolahan dan distribusi hasil produksi. Adanya kebijaksanaan yang dibuat sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah adalah sangat penting di masa datang.

(2) Saran untuk pendidikan dan penguatan organisasi wanita pedesaan

Seperti dikemukakan sebelumnya, ruang lingkup survey yang dilakukan sangat terbatas dan informasi yang diperolehpun tidak seluruhnya dari tangan pertama. Karena itu saran yang disajikan disini hanya berlaku pada organisasi yang ada sekarang ini di delapan desa, dan disarankan agar diambil upaya untuk memperkuat organisasi wanita pada umumnya. Survey lebih lanjut, yang lebih rinci lagi, diperlukan agar bisa diambil alternatif yang konkret.

a) Pendidikan dan penguatan Desa Wisma (DW)

DW adalah organisasi paling bawah dari gerakan PKK, dan untuk mendidik dan memperkuat mereka, perlu dirancang upaya aktivasi yang seksama dengan menempatkan PK di masing-masing tingkat unit desa ketimbang dalam organisasi DW. Dalam pelaksanaan proyek, organisasi DW akhir-akhir ini semakin mandiri, dan diyakini bahwa pengalaman belum cukup untuk program PKK di tingkat desa. Karena itu hal pertama yang diharapkan dilaksanakan ialah penetrasi program PKK itu sendiri. 10 pedoman kegiatan PKK di tingkat provinsi, untuk itu diperlukan pengarahannya dari tingkat kecamatan, dan penguatan program ini serta peningkatan isi program tsb mencakup berbagai ragam hal dan diposisikan sebagai suatu program yang paling realistis. Memang karena PKK itu banyak ragam programnya, maka ada resiko bahwa hanya program tertentu yang jalan/dlaksanakan. Sebaiknyalah dirancang program jangka panjang yang bisa menguatkan organisasi tersebut. PKK itu sendiri mempunyai sistem pendukung

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

yang dilaksanakan secara bertahap yang didukung dengan upah. Karena itu di masa datang perlu dibuat kebijaksanaan mengenai arah program, pemantauan program, pengarahan secara periodik dan sistem umpan balik.

b) Pendidikan dan penguatan kelompok tani wanita /KWT

Sehubungan dengan KWT, perlu dijelaskan hubungan antara program peternakan PKK dengan program KWT yang sekarang ini dilaksanakan secara tumpang tindih, dan diperjelas pembagian peranan, untuk mengaktifkan KWT. Bersamaan dengan studi tingkat tinggi sehubungan dengan masalah mengenai bagaimana menentukan arah kebijaksanaan untuk memasukkan program KWT kedalam pengembangan pertanian.

Selanjutnya untuk jangka panjang, selain pengarahan teknis untuk kebun PKK, peternakan kecil-kecilan, pengalihan produk pertanian, dan perbaikan kehidupan, perlu dilakukan pengarahan untuk teknik pertanian dan produksi dalam rentangan yang lebih luas maupun pengarahan mengenai bagaimana cara menjalankan organisasi bagi KWT.

Untuk maksud ini, hal pertama yang akan diperlukan ialah memberikan kesempatan yang cukup untuk pengarahan oleh pekerja lapangan, yang merupakan saluran satu-satunya bagi KWT. Selain program yang berkaitan dengan teknik pertanian dan produksi, pelaksanaan program pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian teknis pekerja lapangan sehubungan dengan teknik dan organisasi yang ada harus dipertimbangkan.

Sejalan dengan itu penelitian mengenai cara penyempurnaan sistem organisasi juga perlu. Pengembangan dan penjaminan adanya dana kegiatan dan peralatan tentu saja akan penting dalam jangka menengah dan panjang. Juga perlu dirancang sistem yang memberikan kemudahan akses pada kredit maupun akses informasi sehubungan dengan program dukungan organisasi pertanian melalui lembaga dan organisasi, dan memungkinkan kerja sama diantara mereka, akan memperkuat KWT dilihat dari sudut organisasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini ialah membentuk organisasi yang lebih tinggi seperti KUD, atau organisasi koordinasi untuk KWT pada tingkat administrasi yang lebih tinggi.

3.5. *Pengarahan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil pendekatan partisipatif (inti sari dari rekaman Komisi Pendukung proyek ke-2 1996)*

Presentasi berharga dari professor IPB yang dibuat pada seminar akhir proyek tgl. 17 Februari 1997, Kendari dilaporkan dalam komisi di atas sebagai berikut:

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

Pendekatan koperasi agrobisnis termasuk ide untuk meningkatkan andil keuntungan bagi petani adalah sangat penting, berdasarkan refleksi dan proyeksi pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam hal ini, kegiatan seperti pembentukan proyek mini seperti pengolahan jambu mete telah terbukti sukses.

Satu pertanyaan diajukan dari Komisi Pendukung Proyek "Apakah bentuk kerja sama pembangunan pertanian juga baik untuk pendekatan pembangunan partisipatif mengingat kita belum berpengalaman dalam hal itu sebelumnya?" Team leader menjawab bahwa "proyek kerja sama teknik ini ditangani secara kerja sama oleh tiga pihak, yaitu ahli, pendamping dan petani, diuji untuk menjadi pendekatan efektif pada pembangunan partisipatif".

Selain itu komentar berikut dibuat anggota PCS bahwa metoda konvensional untuk perencanaan pembangunan memerlukan pekerjaan yang detail seperti peta topografis, survey tanah, rencana penanaman dan kajian kebutuhan air. Sedang data yang handal dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan sangat sukar memperolehnya dan hanya sedikit pendamping yang ada di daerah.

Dalam kondisi sukar seperti ini akan diijinkan metodologi perencanaan secara non kuantitatif untuk pembangunan pertanian dan pedesaan bagi LLDC. Tidak mungkin ada Insinyur yang mengerti perencanaan dan kriteria rancangan jepang, tetapi akan ada kaum tua yang bijak dan pribumi yang mengetahui apa yang ada dan siapa yang relevan, yang bisa memberi advis mengenai proyek pembangunan pedesaan pada petani bersama-sama dengan insinyur dari instansi pemerintah setempat yang dapat bekerja sama erat untuk proyek tsb. Ide pembangunan umum masih diprakarsai oleh penduduk lokal, yang adalah orang-orang lokal yang mengerti persoalan daerahnya di bawah kepemimpinan orang yang bijak.

Sebelum pengembangan perencanaan, studi sistem sosial seperti apa yang ada di desa, bagaimana komposisi desa, apa yang menjadi sumber kepemimpinan di masyarakat desa, dimana mereka berada dan bagaimana hubungan darah yang ada, bagaimana hubungan status dan sampai sejauh mana hubungan antara pemimpin dengan instansi penda setempat, akan dikaji untuk merumuskan metoda kajian sebagai sebuah manual. Prosedur ini akan menjadi model untuk pembangunan desa dalam LLDC.

Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari keberhasilan di Sulawesi Selatan, sehingga membuat perubahan radikal dari pendekatan pembangunan konvensional.

3.6. Saran-saran dari team evaluasi akhir

(1) Ringkasan dan saran dari masing-masing bidang

- a) Rencana pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu/infrastruktur pertanian dan pedesaan.
 - Efek dari proyek ini ialah bahwa petani sekitar mulai berani membangun sawah dan ladang tadah hujan mereka. Metoda pembangunan untuk situasi seperti itu harus dirancang, dengan mempertimbangkan masalah keterbatasan air, lahan dan sumber daya manusia.
 - Salah satu masalah dari pembangunan ini ialah bahwa pembangunan tersebut berlangsung diluar dari yang diarahkan pada pangan sesuai dengan sumberdaya manusia yang ada, meningkatkan masalah kendala pembangunan yang hanya dimotivasi oleh lahan yang ada. rencana pembangunan haruslah mempertim-bangkan penggunaan lahan, air dan sumberdaya yang tersedia secara rasional.
 - Alih tehnik selanjutnya diperlukan untuk manajemen mutu dan konstruksi beton dan pekerjaan tanah.
 - Manajemen pemeliharaan peralatan dapat mengalami banyak gangguan umum. Sistem pemeriksaan yang dikembangkan untuk proyek ini harus digunakan dengan manajemen operasi yang sesuai.
 - Dalam pembangunan independen, pemerintah propinsi harus mengambil peran sentral dalam pengoperasian proyek dengan bantuan dari badan pemerintah pusat. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Terpadu Kantor Kecamatan Kendari harus didorong untuk berperan dalam hal ini.
 - Sumur-sumur dangkal yang dalamnya 5 meter mengandung resiko tercemar kimia pupuk yang digunakan dalam pertanian. Sumur-sumur ini haruslah disempurnakan agar bisa digunakan secara aman dan berkelanjutan.
- b) Manajemen konstruksi
 - Diperlukan alih tehnik lebih jauh lagi sehubungan dengan kemampuan menilai kondisi lapangan termasuk spesifikasi tehnik yang kompleks, kemiringan dan sifat-sifat tanah, dan taksiran berdasarkan kalkulasi jarak angkut tanah., dsb.
 - Konterpart/pendamping kini tersedia untuk tugas-tugas manajemen konstruksi, seperti penyiapan rencana pelaksanaan untuk fasilitas sederhana dan pekerjaan tanah, dsb. Selanjutnya diperlukan alih pengetahuan tehnik untuk memungkinkan mereka itu dapat menangani sepenuhnya manajemen konstruksi, termasuk perencanaan pelaksanaan

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

pekerjaan yang kompleks, dan penaksiran biaya konstruksi dan pengarahan mengenai pengoperasian peralatan berat.

- Alih tehnik diperlukan untuk elemen-elemen dasar kendali mutu pekerjaan pengecoran yang berkaitan dengan peningkatan tanah, pemadatan turun-naik dari jalan ladang dan ahli manajemen konstruksi yang lain.
- Metoda pengembangan partisipasi petani dan alih pengetahuan tehnik untuk membasmi alang-alang dapat ditingkatkan penerapannya di daerah-daerah yang dapat dibangun, sehingga mereka haruslah ditingkatkan dengan bantuan dari pemerintah propinsi dan instansi terkait.
- Tidak memadainya komunikasi karena keterisolasian kantor proyek dari lokasi proyek harus diatasi.

c) Manajemen pengoperasian dan pemeliharaan mesin

- Keahlian petani dalam pengoperasian dan manajemen masih dalam tahap awal dan masih banyak kendala dijumpai di lapangan. Karena itu diperlukan pelatihan dan pengarahan sehari-hari agar petani bisa mendiagnosa permasalahan.
- Desa model yang jauh dari kota Kendari kurang memiliki bengkel atau fasilitas lainnya untuk melakukan perbaikan. Jadi sistem manajemen pemeliharaan di tingkat desa harus diperkuat, setidaknya sama dengan yang ada di Ranometo. Bila dibandingkan dengan Ranometo, keahlian dan bakat petani di desa lainnya masih jauh di bawah. Pengarahan tehnik untuk petani ini membutuhkan waktu panjang.

d) Percontohan tehnik pertanian dan penggarapan

- Hasil per unit tanaman padi adalah sekitar 1 ton/ha. Dengan penyempurnaan tehnik hasil bisa ditingkatkan menjadi 3.5 ton/ha. Dan khususnya telah terbukti bisa dua kali panen setahun.
- Lokasi medan contoh dipilih secara tepat agar bisa sebagai percontohan. Daerah yang diubah menjadi tanaman muda semakin meluas.
- Padi tadah hujan merupakan pangan penduduk asli yang merupakan mayoritas di daerah proyek, dan mereka juga menggunakannya untuk kegiatan keagamaan. Penyempurnaan tehnik penggarapan sawah tadah hujan perlu dilakukan kalau pembangunan diinginkan secara fair diantara berbagai masyarakat dan penduduk, jadi tanaman ini telah diinkorporasikan kedalam lingkup bantuan tehnik.

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

c) Penguatan organisasi petani

- Bila proyek semacam ini dilaksanakan di masa datang, maka survey dasar mengenai petani harus dilakukan sedini mungkin dengan mempertimbangkan efeknya pada kegiatan tertentu dalam proyek.
- Organisasi petani yang ada sekarang ini masih terpisah satu sama lain fungsinya. Indonesia seharusnya membangun KUD dengan fungsi manajemen terpadu.
- Mengingat organisasi berkembang secara independen, stok dana mereka akan menjadi basis ekonomi, jadi metoda yang tepat untuk mengelola dana ini secara berkesinambungan harus dikaji.
- Di masa datang, pengarahannya harus dipusatkan pada alih pengetahuan teknik di tingkat pekerja lapangan, dan khususnya kegiatan konseling. Selanjutnya semua laporan harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan manual kerja harus dilengkapi agar bisa meningkatkan kemampuan organisasi.

(2) Saran-saran

i) Pengembangan teknik manajemen yang bisa diterima kepada petani

Biasanya sasaran alih pengetahuan teknik pada pendamping adalah langkah pertama. Dalam proyek ini, alih pengetahuan langsung kepada petani juga perlu dalam bidang manajemen fasilitas pertanian dan pedesaan seperti jalan raya dan saluran irigasi yang dibangun dengan partisipasi petani. Karena itu dari sudut pandang pembangunan mandiri setelah berakhirnya bantuan Jepang, perlu sekali merancang teknik manajemen, termasuk pengarahannya pertanian, yang bisa diterima oleh petani. Petani juga harus diberi pelatihan secara berkelanjutan agar bisa mereka menguasai teknik yang ada.

ii) Masa depan proyek (potensi bagi pembangunan mandiri)

Jika proyek diinginkan mampu menghasilkan pembangunan yang mandiri, maka ia harus mempunyai staf yang bermutu dan dengan anggaran yang cukup setidaknya untuk menutupi biaya bahan yang saat ini masih dipasok dari Jepang.

Selanjutnya, setelah berakhirnya program bantuan Jepang, harus dibentuk suatu badan seperti BAPPEDA dan badan-badan lainnya di tingkat propinsi, yang tentu saja badan ini harus bekerja sama dengan departemen Pertanian, PU dan Depdagri dan badan-badan terkait lainnya.

IV Rekomendasi untuk Pembangunan Partisipatif Pertanian dan Pedesaan

iii) Perlunya Bantuan Jepang di masa datang

Menurut catatan yang ditandatangani tanggal 26 Januari 1991, proyek ini akan berakhir tanggal 29 Februari 1996, namun kenyataannya pekerjaan reklamasi tanah hanya bisa dilakukan di musin kemarau, dan masalah lainnya, telah memperlambat selesainya fasilitas pertanian, mungkin pada bulan Desember. Diperlukan pekerjaan selanjutnya untuk merancang tehnik manajemen yang bisa diterima kepada petani. Karena itu team survey bersama menyarankan agar bantuan Jepang untuk proyek ini diperpanjang dan ditindak lanjuti sepenuhnya.

Team survey bersama menyarankan agar program diperpanjang satu tahun, namun bantuan selanjutnya harus dipertimbangkan mengingat kemajuan dalam peningkatan organisasi tani, khususnya manajemen air, dalam pengembangan tehnik bercocok tanam dan pertanian, dan dalam pekerjaan lainnya yang ditentukan oleh TSI.

Lampiran

Attachment

1. List of Authorities Concerned

- 1.1 Basic Survey Team of JALDA Overseas Village Development in Southeast Sulawesi Province AT - 1
- 1.2 JICA Experts (Long-term/Short-term) and Counterparts No.1 AT - 2
- 1.3 Members of Supporting Committee for Overseas Agricultural Development Project AT - 5
- 1.4 Counterpart Trainees in Japan AT - 6
- 1.5 Members of the Indonesian Authorities concerned AT - 7

2. List of Supplied Equipments, Machineries and Materials

- 2.1 Provision of Equipments and the Expenditures from JICA AT - 8
- 2.2 Supplied Equipment and Machinery in the Project AT - 9

3. Record of Discussions and other papers

- 3.1 The Record of Discussions AT - 36
- 3.2 Tentative Schedule of Implementation (TSD) AT - 49
- 3.3 Indonesian Request on Dispatch of Experts in Agricultural Field AT - 53
- 3.4 Japanese Response to the Request on the Experts in Agricultural Field AT - 55
- 3.5 Terms of Reference on Local Energy Training provided to incorporate to this project AT - 58
- 3.6 Address on the Signing Ceremony of the Record of Discussion and Press-Release Paper AT - 61

4. Organization Chart (Indonesian Side)

- 4.1 Ministry of Agriculture (MOA) AT - 67
- 4.2 Organization for Project Implementation (National, Provincial and Kabupaten Level) AT - 68
- 4.3 Flowchart of Project Activities AT - 69
- 4.4 Chart of Indonesia - Supporting System AT - 70

5. Project Evaluation (Results of Survey and Evaluation Missions)

- 5.1 Plan discussion survey (April 1992) AT - 71
- 5.2 Interim evaluation (October 1993) AT - 75
- 5.3 Final evaluation (November 1995) AT - 81

6. Drawings AT - 95

7. Documentary Photographs AT - 106

8. Tables AT - 119

- 8.1 The Progress of Activities on the six (6) years flame work plan AT - 120
- 8.2 Implementation plan, target and performance of the cooperation project AT - 121
- 8.3 Japanese Contribution / Indonesian Responsibility AT - 132
- 8.4 Development of Mode Infrastructure AT - 133
- 8.5 Technical Support Tasks AT - 136
- 8.6 Infrastructure development results by village wise with work type in the project AT - 138

1. Daftar badan yang berwenang terkait

**1.1 Basic Survey Team of JALDA Overseas Village Development
in Southeast Sulawesi Province**

Name	Field	Period	
Nobuyoshi Kayano	Team Leader	First	7 Aug. 1989 - 31 Oct. 1989
	Regional Planning	Second	23 Dec. 1989 - 25 Mar. 1990
Koji Hattori	Project Manager	First	7 Aug. 1989 - 12 Aug. 1989
Tatsuo Matsunaka	Irrigation and drainage	First	7 Aug. 1989 - 10 Oct. 1989
		Second	23 Dec. 1989 - 25 Mar. 1990
Yoshiya Takashima	Farming Guidance	First	7 Aug. 1989 - 12 Aug. 1989
		Second	20 Feb. 1990 - 10 Mar. 1990
Syunsuke Akamatsu	Agricultural Economics	Second	10 Jan. 1990 - 9 Feb. 1990
Ken Higashimaki	Livestock Development	Second	10 Jan. 1990 - 9 Feb. 1990

1.2 JICA Experts (Long-term/Short-term) and Counterparts

Long-term Assignment		Name of Counterpart		1991	1992	1993	1994	1995	1996
		Full-time	Part-time	Organization					
Nobuyoshi Kayano (Team leader/Regional Planning)		Mr. Zainal Abidin		Regional Office, MOA					
		Mr. Edison Dayoh		BAPPEDA, Province	9/30				
		Mr. Ridwan Zakariah							
		Dr. Faisai Kasryno		Planning Bureau, MOA	6/30				
		Dr. Chauri A. Rasahao		"	7/1				
Saichi Ogasawara (Coordinator)		Mr. Yusuf Yakub		Regional Office, MOA	6/10				
		Mr. La Aowu		BAPPEDA, Province	6/10				
		Dr. La Ode Abd. Rauf		"	6/10				
		Mr. Putu B. Arsana		Planning Bureau, MOA	6/10				
		Mr. Theodosius Mangape		Regional Office, MOA	6/5				
Tatsuo Matsunaka (Agricultural and Rural Infrastructure)		Mr. Rahman Garrahma		"	6/5	8/8			
		Mr. Prastyo Budi R.		Public Work, Province	6/10			3/31	
				Regional Office, MOA					
		Mr. Suyadi		Public Work, Province	10/1				
				Regional Office, MOA		7/8			
Syuji Takaoka (Agricultural and Rural Infrastructure)		Mr. Prastyo Budi R.		"		8/1			
				Public Work, Province	10/1				
		Mr. Suyadi		Regional Office, MOA					
		Mr. Almali		"					
				Regional Office, MOA	6/14	9/30			
Fujiyoshi Hatanaka (Construction management)		Mr. Yusrul Tahir		Regional Office, MOA					
		Mr. Yusrul Tahir		Regional Office, MOA	10/1				
		Mr. Abdul Rias		Food Crops, Province		4/1			
		Mr. Rahman Garrahma		Public Work, Province	6/10			3/31	
				Regional Office, MOA	8/26		2/25		
Tokutaro Saia (Construction management)		Mr. Juhun		Regional Office, MOA	10/1				
Ryoji Tamakuma (Operation and Maintenance of Machinery)									

1.2 JICA Experts (Long-term/Short-term) and Counterparts

Long-term Assignment			1991	1992	1993	1994	1995	1996
	Name of Counterpart							
	Full-time	Part-time						
Tadao Kamo (Operation and Maintenance of Machinery)	Mr. Juhuri	Mr. Soetigno	10/1			9/29		2/28
	Mr. Muhsin Ideal	Mr. La Pauja			4/1	12/1	4/1	
Yoshiya Takashima (Farming Guidance)	Mr. Syamsul Rijal	Mr. Syamsul Rijal	6/5			6/4		
	Mr. Juhuri		7/1					3/31
	Mr. Anri Dayan	Mr. Ma'ruf Jafar	10/1	4/1				
		Mr. Nodi Samu						
Terbisa Namba (Farming Guidance)	Mr. Syamsul Rijal	Mr. Syamsul Rijal	10/1			5/16		2/28
	Mr. Rusam Supendi	Mr. Joni Ginting			4/1			3/31
	Mr. Supriyanto		10/1			4/10	8/24	
		Mr. Soetigno					4/1	
		Mr. Nodi Samu	10/1					
Yoshihiko Nishimura (Farmer's Group Strengthening)		Mr. Ma'ruf Jafar		4/1				
	Mr. Mappinangku		8/26			8/25		
	Mr. Bien Bangapadang	Mr. Mansur Azis						
Hajime Kikuchi (Farmer's Group Strengthening)	Mr. Mappinangku							
	Mr. Bien Bangapadang		10/1			8/3		2/28
	Mr. Andi Aria Pangerang				4/1			
		Mr. Yanas Suryana			4/1			
		Mr. Syamsul Rijal				4/1	4/1	

1.2 JICA Experts (Long-term/Short-term) and Counterparts

Short-term Assignment	Counterpart		1991	1992	1993	1994	1995	1996
	Full time	Part time						
Syusuke Akamatsu (Agricultural Economics)		Mr. Mustary Jalal	9/30 11/14 9/30	1/11 3/10	10/24 12/9	1/4 1/24 1/10	2/2 2/2	
Toshio Morokuma (Designing Agricultural Facilities)		Mr. Prasetyo Budi Rahadjo	10/14 11/29 10/1	7/31				
Kazumi Karube Takashi Kobayashi (Soil Analysis)		Mr. Siradjuddin Mr. Abdul Rias	1/21 2/19 1/11 1/20	7/22 3/10 9/1	9/21 7/31			
Yoshiki Abe Kenichi Ueda Syoji Uchizawa (Livestock Development)		Mr. Hasan Mardiono	3/2 3/31 11/20	2/19 3/1	9/23 12/22	10/2 11/25 9/3 11/2		
Akira Ito Chiechi Murayama (Water Resources Development)			10/11 12/14	10/21 12/20				
Seiji Fujita Keiji Tokunaga Kyoze Kabamoto (Land Reclamation by Heavy Machines)			8/20 11/23		10/2 2/2 10/8 12/26	10/1 10/29		
Hideyuki Kanamori (Agri. and Rural Facilities Development)					2/1 3/31			
Takako Haraguchi (Project Cycle Management Method)					3/23 4/5			
Minobu Horie (Regional Development Planning)					8/3 8/15			
Keiko Iagaki (Strengthening of Rural Women's Group)						2/3 4/30		
Keiji Miya (Operation of Water)						9/18 11/16		
Toshimasa Kiyonaga (Regional Development Planning)						11/1 11/2		

1.3 Members of Supporting Committee for Overseas Agricultural Development Project

Fiscal Year	Name	Post and Organization
1991	Hikaru Tsutsui	Professor, Kinki University
	Yoshihiro Kaida	Professor, Research Center of South West Asia
	Masato Uwagawa	Professor, Komazawa University
	Takeo Yamaguchi	Director, II Division, Tropical Agriculture Research Center
	Humihiko Sano	Professor, Meiji University
	Koichiro Katsurai	International Cooperation Expert, Japan International Cooperation Agency (JICA)
	Hiroshi Takeuchi	Ex-director, Agriculture, Forestry and Fisheries Division, Mie Prefecture
	Masashi Morita	Director, Overseas Land Improvement Technology Division, Ministry of Agriculture Forestry and Fishery
	Sadakichi Yoshida	Ex-leader, Agriculture Development Project
1992	Hikaru Tsutsui	Professor, Kinki University
	Yoshihiro Kaida	Professor, Research Center of South West Asia
	Masato Uwagawa	Professor, Komazawa University
	Takeo Yamaguchi	Director, II Division, Tropical Agriculture Research Center
	Humihiko Sano	Professor, Meiji University
	Ryuhei Hunano	Director, Overseas Land Improvement Technology Division, Ministry of Agriculture Forestry and Fishery
	Sadakichi Yoshida	Ex-leader, Agriculture Development Project
1993	Hikaru Tsutsui	Professor, Kinki University
	Yoshihiro Kaida	Professor, Research Center of South West Asia
	Masato Uwagawa	Professor, Komazawa University
	Masahito Sato	Director, Interchange Division of Overseas Research Data, Tropical Agriculture Research Center
	Fumihiko Sano	Professor, Meiji University
	Koichiro Katsurai	International Cooperation Expert, Japan International Cooperation Agency (JICA)
	Sadakichi Yoshida	Ex-leader, Agriculture Development Project
1994	Ryuhei Hunano	Director, Overseas Land Improvement Technology Division, Ministry of Agriculture Forestry and Fishery
	Hikaru Tsutsui	Professor, Kinki University
	Yoshihiro Kaida	Professor, Research Center of South West Asia
	Masato Uwagawa	Professor, Komazawa University
	Masahito Sato	Director, Interchange Division of Overseas Research Affairs, Tropical Agriculture Research Center
	Hideyuki Kanamori	Visiting Development Specialist, Japan International Cooperation Agency (JICA)
	Sadakichi Yoshida	Ex-leader, Agriculture Development Project
1995	Ryuhei Hunano	Director, Overseas Land Improvement Technology Division, Ministry of Agriculture Forestry and Fishery
	Hikaru Tsutsui	Professor, Kinki University
	Yoshihiro Kaida	Professor, Research Center of South West Asia
	Masato Uwagawa	Professor, Komazawa University
	Masahito Sato	Director, Interchange Division of Overseas Research Data, Tropical Agriculture Research Center
	Hideyuki Kanamori	International Cooperation Expert, Japan International Cooperation Agency (JICA)
	Sadakichi Yoshida	Ex-leader, Agriculture Development Project
1996	Ryuhei Hunano	Director, Overseas Land Improvement Technology Division, Ministry of Agriculture Forestry and Fishery
	Hikaru Tsutsui	Professor, Kinki University
	Yoshihiro Kaida	Professor, Research Center of South West Asia
	Masato Uwagawa	Professor, Komazawa University
	Masahito Sato	Director, Interchange Division of Overseas Research Affairs, Tropical Agriculture Research Center
	Fumihiko Sano	International Cooperation Expert, Japan International Cooperation Agency (JICA)
	Shiro Akamatsu	International Cooperation Expert, Japan International Cooperation Agency (JICA)
	Sadakichi Yoshida	Ex-leader, Agriculture Development Project
	Akio Motosugi	Director, Overseas Land Improvement Technology Division, Ministry of Agriculture Forestry and Fishery

1.4 Counterpart Trainees in Japan

Name	Contents of Training	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Dr. Faisal KASRYNO	Study Tour	8/16 1991 8/30		7/11 1993 7/24			
Mr. Soedjatmiko	Study Tour				10/10 1994 10/22		
Dr. La Ode Abdul Rauf	Study Tour					7/24 1995 8/3	
Dr. Chairil A. Rasahan	Study Tour						7/22 1996 7/27
Mr. La Ode Kaimoeddin	Study Tour						7/22 1996 7/27
Dr. Abdul Razak Porosi	Study Tour						
Mr. Putu B. Arsana	Agricultural Economy/Regional Development	1/15 1991 2/16					
Mr. Yusuf YAKUB	Project Management	3/23 1991 4/7					
Mr. Zainal ABIDIN	Agricultural Cooperative	5/8 1991 7/19					
Mr. Syamsul RUAL	Vegetable Seed Production		2/8 1992 11/26				
Mr. Ridwan ZAKARIAB	Regional Agricultural Administration		2/21 1992 3/20				
Mr. H. BUHARI	Regional Development Planning					6/25 1995 7/15	
Mr. SUTOPO	Agricultural Development Planning		3/14 1992 4/9				10/7 1996 11/1
Mr. SUYADI	Construction/Land Reclamation Planning						
Mr. Nodi SATTU	Vegetable Cultivation/Farming Guidance			8/23 1993 9/17			
Mr. Mustan JALAL	Agricultural Economy/Marketing			9/16 1993 12/28			
Mr. JUHURI	Farm Mechanization			2/14 1993 11/18			
Mr. Ben BANGAPADANG	Agricultural Extension/Marketing System			5/10 1993 9/15			
Mr. Hasan MARDUJONO	Livestock Development			11/26 1993 12/3			
Mr. MAPPINANGKU	Vegetable Production			2/27 1994 9/22			
Mr. SOEWONDO	Perennial Crops Production					9/17 1995 10/7	
Mr. Rustan SUPENDY	Rice Production					2/26 1996 10/25	
Mr. Prasetyo Budi RAHARDJO	Construction management					8/26 1996 9/20	

1.5 Members of the Indonesian Authorities concerned

Central Agencies

(Kendari, August 15, 1993)

Name	Post	Organization
Dr. Ali RACHMAN	Director of Bureau Agricultural Irrigation	Bureau of Agricultural Irrigation National Development Planning Agency (BAPPENAS)
Dr. Ir. Chairil ANWAR	Director of Bureau of Planning	Bureau of Planning Ministry of Agriculture (MOA)
Dr. Ir. Murasa SARKANIPUTRA	Chief of Planning and Program Division	Bureau of Planning Ministry of Agriculture
Dr. Ir. Togar A NAPITUPULU	Chief of Agricultural Regional Planning Division	Bureau of Planning Ministry of Agriculture
Mr. Putu B. ARSANA, SE, MS	Chief of Agricultural Regional Planning Division (Person in charge of Eastern-part Region)	Bureau of Planning Ministry of Agriculture
H. Suharyo HUSEN, B. SC., SE.	Chief of International Cooperation Division	International Cooperation Bureau
Ir. Rismansyah DANASAPUTRA		International Cooperation Bureau
Mr. HUSEM		Secretariat of Cabinet : SECAB

Regional Agencies

(Kendari, August 15, 1993)

Name	Post	Organization
Ir. Yusuf YAKUB, M.Ed	Head of Regional Office	Regional Office in Southeast Sulawesi Province Ministry of Agriculture
Ir. Zainal ABIDIN	Head of Regional Program Division	Regional Office in Southeast Sulawesi Province Ministry of Agriculture
Drs. H. La Ode Kaimuddin	Governor	Provincial Office Provincial Government in Southeast Sulawesi Province
Dr. La Ode Abdul RAUF	Head of BAPPEDA	Regional Development Planning Agency Provincial Government in Southeast Sulawesi Province
Drs. Ridwan ZAKARIAH	Head of Physical Division	Regional Development Planning Agency Provincial Government in Southeast Sulawesi Province